

**EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG
LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

POPPY ABELLYA ZALZABILLA

NIM: 1913111051

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

**EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG
LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Disusun oleh :

POPPY ABELLYA ZALZABILLA

NIM: 1913111051

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA
SURABAYA

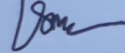
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

POPPY ABELLYA ZALZABILLA
1913111051


Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



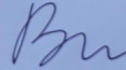
Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 08847501019

Pembimbing II



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

POPPY ABELLYA ZALZABILLA
1913111051

Tanggal Ujian : 27 Juni 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 08847501019

Pembimbing II

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 08847501019

Penguji II

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Penguji III

Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : POPPY ABELLYA ZALZABILLA
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 24 Juni 2001
NIM : 1913111051
Fakultas / Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA**" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



POPPY ABELLYA ZALZABILLA

MOTTO

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

-Poppy-

“Tidak perlu bikin skripsi yang bisa mengubah dunia, memajukan tatanan negara, apalagi mempengaruhi pola pikir anak bangsa. Cukup bikin skripsi yang selesai aja”

-Cloudy-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya” dapat selesai tepat pada waktunya. Tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji, SH., MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Ismail, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada penulis sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan skripsi dapat terselesaikan.
4. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dalam membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Tutik yang telah membuat surat izin penelitian dan membantu dalam pengurusan administrasi.

6. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan baik dari segi materi maupun non materi dan doa yang tulus kepada penulis.

7. Neyzha Aulia Shevia yang telah bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi di tengah malam dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Ibu Dra. Ida Widayati, MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Bapak Muhammad Aries Hilmi, S.STP selaku Camat Genteng, Bapak Muclish Hariadi, S.Sos selaku Camat Wonocolo, dan Bapak Dr. Denny Christupel Tupamahu, AP, S.H, SE.M.Si, M.H, M.Psi selaku Camat Benowo yang telah mengizinkan peneliti dalam proses pengumpulan data dan informasi tentang Layak Anak.

9. Para KaSi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di tingkat kecamatan. Ibu Rochmi Nugrahani selaku KESPER kecamatan Genteng, Ibu Budi Yusvandayani, SH, M.Hum selaku KESPER kecamatan Wonocolo, dan Bapak Fendy Ardiani Pradhana S.STP selaku KESPER kecamatan Benowo yang telah membantu proses pengumpulan data dan bersedia menjadi narasumber pada penelitian skripsi.

10. Bapak Dicky Prastya Kuswardhana, S.Psi selaku staff bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, Bapak Mochamad Taufik Siswanto, ST selaku Sekretaris Kecamatan Benowo, dan Ibu Rina Puji Astuti, SH

selaku staff operating system (OS) Kecamatan Benowo yang telah membantu peneliti selama proses pengumpulan data.

11. Dinita Sari yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta bersedia membantu penulis apabila mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Putri Ayu Maysaroh Djaelani, Shinta Aldawiya, dan Hasby Ashshiddiqi sebagai bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini. Terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini untuk meluangkan tenaga maupun pikiran dan selalu senantiasa sabar.

13. Fatma Indrawati, Fitria Virdaus Nuzula, Kartika Santi Ratna Puspita, Clariza Trisardhana, dan Elsa Rochmawati sebagai partner penulis di Prodi Administrasi Publik kelas B yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa serta berjuang bersama-sama dalam proses penyelesaian skripsi ini.

14. Semua teman-teman kelas Administrasi Publik B angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

15. Keluarga besar HIMAPURA (Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya) sebagai keluarga kedua penulis yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis serta menjadi tempat untuk belajar dan mendapatkan pengalaman berharga yang tidak penulis dapatkan di kelas.

16. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 06 Juni 2023

Penulis

Poppy Abellya Zalzabilla

EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Poppy Abellya Zalzabilla

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: poppyzalzabilla1538@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan program pemerintah layak anak di kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dan dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dan Tiga (3) wilayah kecamatan yang menjadi pilar project (Kantor Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Benowo), dengan subjek penelitian yaitu Kepala DP5A Kota Surabaya, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di tiap wilayah kecamatan. Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dan dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak. Sumber informasi ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengimplementasian Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya meliputi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, diperlukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Sumber dana berasal dari APBD dan terjalin sikap komitmen yang baik antar pelaksana. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu telah sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan, para pelaksana memiliki komitmen dan loyalitas yang baik dan komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat merespon positif dengan adanya kegiatan Layak Anak ini. (3) Dampak yang ditimbulkan yaitu kerjasama yang terjalin cukup efektif, penyelesaian permasalahan cepat, tepat dan tidak berbelit, pencapaian hasil kegiatan cukup membantu pemerintah dalam menuntaskan kasus permasalahan anak. Tentunya kegiatan ini cukup tersebar secara merata di seluruh Kota Surabaya.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, kota layak anak, pemerintah

EVALUATION OF THE GOVERNMENT'S CHILD FRIENDLY PROGRAM IN SURABAYA CITY

Poppy Abellya Zalzabilla

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences

Bhayangkara University, Surabaya

Email: poppyzalzabilla1538@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the government's child-friendly program in the city of Surabaya in making Child Friendly Districts (KLA), supporting factors and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's program on Child Friendly. The research method used is descriptive qualitative. The location of this research is at the Population Control, Women's Empowerment and Child Protection Office (DP5A) of Surabaya City and Three (3) sub-district areas that are pillars of the project (Genteng Sub-district Office, Wonocolo Sub-district, Benowo Sub-district), with the research subject being the Head of DP5A Surabaya City, Head of the People's Welfare and Economic Section in each sub-district area. The focus of this research is the Implementation of the Government's Child Friendly Program, the supporting and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's Child Friendly program. Sources of information were determined using purposive sampling techniques, data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis techniques with data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) Implementation of the Government Program on Child Friendly in Surabaya City includes communication delivered to the community through various media, cooperation with other related agencies is needed. The source of funds comes from the APBD and there is a good attitude of commitment between implementers. (2) The influencing factors are in accordance with the objectives of the activities that have been set, the implementers have good commitment and loyalty and the communication delivered uses language that is easily understood by the community so that the community responds positively to the existence of this Child Friendly activity. (3) The impact is that the cooperation that is established is quite effective, problem solving is fast, precise and straightforward, the achievement of activity results is enough to help the government in solving cases of child problems. Of course, this activity is quite evenly distributed throughout the city of Surabaya.

Keywords : Policy implementation, child-friendly cities, government

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Definisi Konsep | 8 |
| 1.6 Metode Penelitian | 14 |
| 1.6.1 Lokasi Penelitian | 14 |
| 1.6.2 Subyek Penelitian | 16 |
| 1.6.3 Fokus Penelitian | 16 |
| 1.6.4 Sumber Informasi | 19 |
| 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| 1.6.6 Teknik Analisis Data | 25 |
| 1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian | 29 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 31 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 31 |
| 2.2 Kerangka Konseptual | 36 |
| 2.3 Tinjauan teoritis | 37 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.3.1 | Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya | 37 |
| 2.3.1.1 | Kebijakan Publik | 37 |
| 2.3.1.2 | Implementasi Kebijakan | 38 |
| 2.3.1.3 | Program Layak Anak | 40 |
| 2.3.2 | Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya | 41 |
| 2.3.3 | Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya | 43 |
| 2.3.3.1 | Evaluasi Kebijakan Publik | 43 |
| 2.3.3.2 | Dimensi Kajian Evaluasi | 46 |
| 2.3.3.3 | Kriteria Untuk Evaluasi | 49 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | | 51 |
| 3.1 | Gambaran Umum Kota Surabaya | 51 |
| 3.1.1 | Kondisi Umum Kota Surabaya | 51 |
| 3.1.1.1 | Lambang Kota Surabaya | 52 |
| 3.1.1.2 | Visi dan Misi | 52 |
| 3.1.2 | Kondisi Geografis | 57 |
| 3.2 | Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) | 58 |
| 3.2.1 | Kondisi Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) | 58 |
| 3.2.1.1 | Sejarah Singkat | 58 |
| 3.2.1.2 | Visi dan Misi | 59 |
| 3.2.1.3 | Struktur Organisasi | 60 |
| 3.2.1.4 | Tugas Pokok dan Fungsi | 60 |
| 3.3 | Pemerintah Kecamatan Genteng | 82 |
| 3.3.1 | Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Genteng | 82 |
| 3.3.2 | Kondisi Geografis Kecamatan Genteng | 82 |
| 3.3.3 | Visi dan Misi Kecamatan Genteng | 84 |
| 3.3.4 | Struktur Organisasi | 85 |

| | | |
|--|---|-------------|
| 3.4 | Pemerintah Kecamatan Wonocolo | 86 |
| 3.4.1 | Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Wonocolo | 86 |
| 3.4.2 | Kondisi Geografis Kecamatan Wonocolo | 86 |
| 3.4.3 | Visi dan Misi Kecamatan Wonocolo | 88 |
| 3.4.4 | Struktur Organisasi | 89 |
| 3.5 | Pemerintah Kecamatan Benowo | 90 |
| 3.5.1 | Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Benowo | 90 |
| 3.5.2 | Kondisi Geografis Kecamatan Benowo | 90 |
| 3.5.3 | Potensi Kecamatan Benowo | 92 |
| 3.5.4 | Visi dan Misi Kecamatan Benowo | 93 |
| 3.5.5 | Struktur Organisasi | 94 |
| BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA | | 95 |
| 4.1 | Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya | 96 |
| 4.2 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan. | |
| 4.3 | Dampak Evaluasi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya | 114 |
| BAB V PENUTUP | | 124 |
| 5.1 | Kesimpulan | 124 |
| 5.2 | Saran | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 127 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | xvii |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Langkah-Langkah Penelitian..... | 30 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| Tabel 3.1 Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Genteng..... | 83 |
| Tabel 3.2 Luas Wilayah Kecamatan Genteng..... | 84 |
| Tabel 3.3 Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Wonocolo..... | 87 |
| Tabel 3.4 Luas Wilayah Kecamatan Wonocolo..... | 87 |
| Tabel 3.5 Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Benowo..... | 91 |
| Tabel 3.6 Luas Wilayah Kecamatan Benowo..... | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Components of Data Analysis: Interactive Model..... | 28 |
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian..... | 36 |
| Gambar 3.1 Peta Kota Surabaya..... | 51 |
| Gambar 3.2 Lambang Kota Surabaya..... | 52 |
| Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)..... | 60 |
| Gambar 3.4 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Genteng..... | 82 |
| Gambar 3.5 Visi Kecamatan Genteng..... | 84 |
| Gambar 3.6 Misi Kecamatan Genteng..... | 85 |
| Gambar 3.7 Struktur Organisasi Kecamatan Genteng..... | 85 |
| Gambar 3.8 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Wonocolo..... | 86 |
| Gambar 3.8 Visi Kecamatan Wonocolo..... | 88 |
| Gambar 3.9 Misi Kecamatan Wonocolo..... | 88 |
| Gambar 3.10 Struktur Organisasi Kecamatan Wonocolo..... | 89 |
| Gambar 3.11 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Benowo..... | 90 |
| Gambar 3.12 Visi Kecamatan Benowo..... | 93 |
| Gambar 3.13 Misi Kecamatan Benowo..... | 93 |
| Gambar 3.14 Struktur Organisasi Kecamatan Benowo..... | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai cikal bakal penggerak dan pemimpin yang akan sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa mendatang. Layaknya sebuah investasi bagi suatu negara, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, pembentukan serta pengembangan bagi masing-masing individu sebab nantinya masa depan negara berada di tangan mereka, sebagai anak mudanya. Sehingga, apabila telah mempersiapkan pewaris bangsa yang berkualitas tentu akan berkorelasi dan berimplikasi terhadap bagaimana suatu negara di masa yang akan datang.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menjelaskan bahwa anak ialah individu yang belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih dalam kandungan. Anak yang belum berumur 18 tahun masih rawan terhadap masalah sosial. Seperti eksploitasi terhadap anak, dimana anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah malah dipaksa untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya putus sekolah. Banyak contoh yang dapat kita temukan seperti meminta di lampu merah, mengamen, menjual koran, tisu dan lainnya sampai larut malam. Termasuk kejahatan lainnya kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, anak yang berhadapan dengan

hukum, HIV/AIDS, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan lainnya.

Melihat kondisi di atas melalui konvensi anak tanggal 5 September 1990, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak – hak anak. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 10 Mei 2002 ketika sidang PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) ke- 27 khusus mengenai anak, Indonesia ikut serta dalam menandatangani *World Fit For Children Declaration* (WFC) atau disebut juga sebagai Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA). Kemudian tahun 2004 Indonesia mulai menuangkan “Program Nasional Bagi Anak (PNBAI)”. Program ini menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam proses pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental (Fitriani, 2016:250-258). Pemerintahan Indonesia mulai menyusun strategi untuk melindungi hak anak yang ada di Indonesia dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah merintis pembentukan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten atau kota Layak Anak (KLA)

ialah bentuk program tingkat kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan basis hak anak dengan pengintegrasian sumber daya dan komitmen pemerintah, swasta dan warga, yang direncanakan dengan komprehensif dan berkelanjutan pada program, kebijakan dan aktivitas agar dapat memberikan jaminan tercukupinya hak anak.

Adapun Kota Layak anak memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dan secara khusus adalah : untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 mengenai Indikator KLA , terdapat lima klaster hak anak yaitu 1. kebebasan dan hak sipil, 2. pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga, 3. kesejahteraan dan kesehatan dasar dan, 4. edukasi, aktivitas budaya dan pemanfaatan waktu senggang, 5. perlindungan khusus. Suatu kabupaten atau kota dapat dicanangkan sebagai KLA apabila semua klaster terpenuhi dan adanya pemenuhan hak-hak anak.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan terkhusus untuk anak, pemenuhan di setiap kebutuhan harus terpenuhi. Pemenuhan di setiap kebutuhan harus sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga akan mendapatkan kebutuhan sesuai dengan yang ia butuh kan bukan sesuai dengan yang ia inginkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tersusun dalam

sebuah hierarki yang disebut hierarki Maslow. Di dalam hierarki kebutuhan Maslow ada 5 tingkatan yang harus terpenuhi, salah satunya yang akan dibahas relevansi mengenai kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dengan indikator Kota Layak Anak atau lima klaster hak anak.

Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan yang dapat di contohkan dengan melakukan pengamatan terhadap anak usia dini, sebab anak usia dini ketika mendapatkan ancaman atau situasi yang mencekam, mereka sama sekali tidak menahan-nahan reaksi ini. Sama halnya ketika anak yang belum terbiasa dengan situasi yang baru, wajah baru, orang tidak dikenal, dan lingkungan yang berisik. Mereka belum bisa menutupi rasa tidak aman yang mereka rasakan.

Dengan reaksi-reaksi yang mereka rasakan ini menandakan bahwa di sinilah pentingnya memenuhi kebutuhan akan keselamatan, karena tidak hanya anak usia dini melainkan orang dewasa pun membutuhkan atau menyukai situasi yang aman dan stabil, sehingga mereka bebas dari perasaan ketakutan maupun kecemasan. Contohnya pengawasan orang tua di lingkungan sekolah, memantau anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masing-masing orang tua memang berbeda dalam pemberian pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, tergantung kondisi anak dan kondisi di lingkungan sekolah

Begitu pun dengan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang meliputi sikap kepedulian antara orang tua dan anak, perhatian dari ibu atau

ayah yang mendampingi anaknya di sekolah dan wujud tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Pada umumnya pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang orang tua berikan pada anak-anak mereka adalah sikap perhatian.

Lalu kebutuhan penghargaan meliputi *support*, pujian yang diberikan kepada anak, pengakuan di lingkungan keluarga maupun sekolah, pengertian dan pemahaman kondisi masing-masing anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan muncul rasa percaya diri di dalam diri anak.

Pengembangan KLA umumnya memiliki tujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kota atau kabupaten yang mengarahkan kepada usaha perubahan konsepsi hak anak pada program, kebijakan, atau aktivitas untuk memberi jaminan tercukupinya hak anak pada kabupaten/kota (Saputra, 2019:26). Apresiasi pelaksanaan KLA pada kabupaten/kota diberikan dengan lima kategori peringkat yaitu 1. KLA , 2. Utama, 3. Nindya, 4. Madya, dan 5. Pratama. Kabupaten/Kota yang berada di Negara Indonesia mulai mengembangkan KLA untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) pada tahun 2021 mereka memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada 275 Kabupaten/Kota. Kota Surabaya merupakan salah satu dari 3 kota atau kabupaten lainnya seperti Kota Yogyakarta, Kota Denpasar dan Kota Surakarta yang memperoleh penghargaan KLA pada kategori Utama.

Berdasarkan pencapaian prestasi tersebut tentunya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kota Layak anak

(KLA) menjadi perhatian utama. Implementasi dari program KLA ini masih terlihat beberapa masalah seperti : keberadaan anak- anak yang di eksploitasi dengan menjual tissue, koran, dan mengamen di di beberapa titik lampu merah di Kota Surabaya . Jumlah kasus kekerasan kepada anak masih tinggi dan meningkat jumlahnya. Hal ini terlihat pada bulan Januari sampai Juni tahun 2021 terdapat 50 kasus. Kemudian kasus kekerasan seksual kepada anak mengalami peningkatan yaitu mencapai 66 kasus atau 24 persen di tahun 2022 (<https://www.jawapos.com>).

Dari kasus yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan kepada anak masih tinggi. Khususnya di Kota Surabaya masih terlihat anak-anak usia sekolah yang masih di eksploitasi dengan menjual tisu, koran, dan mengamen di beberapa titik lampu merah di Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan yang nantinya akan dijadikan landasan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?

3. Adakah dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi program pemerintah layak anak di kota Surabaya dalam menjadikan Kota Layak Anak (KLA)
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
3. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis maupun praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang meliputi:

1. Bagi mahasiswa, sebagai bentuk dharma mahasiswa yaitu penelitian, sehingga mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan baik, sehingga di kemudian dapat digunakan acuan dalam melakukan hal yang sama..
2. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Bhayangkara Surabaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, agar dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup administrasi publik.

3. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan referensi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya agar seluruh implementor kebijakan terlaksana secara maksimal, seperti tercapainya kemitraan struktur birokrasi antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sendiri termasuk anak, dalam upaya bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

1.5 Definisi Konsep

Daftar Istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

Program layak anak ini diawali adanya kejadian atau kasus yang mana pelaku atau korban kejahatan dari unsur anak di bawah umur, maka pemerintah membuat kebijakan berupa kota layak anak (KLA), sebagaimana pendapat menurut James E Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008 : 20-21) tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Rangkaian proses dari kebijakan publik yaitu proses pembuatan atau merumuskan suatu kebijakan, kemudian proses implementasi kebijakan, dan melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Nugroho (2004 : 123).

Berbagai program telah dipilih pemerintah sebagai alternatif pemecahan masalah dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi-instansi pemerintah tingkat bawah melalui mobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasinya yang baik, maka pencapaian target yang sudah di cita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Implementasi Kebijakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menerjemahkan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam tindakan. Menurut Parson (2005: 456) mengartikan bahwa implementasi kebijakan itu adalah bentuk pelaksanaan kebijakan dengan cara-cara lain. dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut adalah proses yang terus bergerak, yaitu implementor kebijakan

melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan itu.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2004:159). Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

3. Indikator Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Goggin et al. (1990) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastusi (2012 : 89), kebijakan adalah sebagai suatu “pesan” dari pemerintah (pusat) kepada PEMDA. adapun indikator pelaksanaan pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :

1. Bentuk dari Isi kebijakan (*the content of policy message*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Bentuk format dari kebijakan (*the form of the policy message*)

3. Bentuk dari reputasi aktor (*the reputation of the communicators*)

Sedangkan menurut Rondinelli dan Cheema (1983 :28) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastusi (2012 : 90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (*enviromental conditions*)
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characterisis implementing agencies*)

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009 : 512) ” implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009) ” implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Indikator yang digunakan dalam Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya, dimana fokus penelitian yakni pada kluster V Perlindungan Khusus menggunakan teori Edward III yang menyarankan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif yaitu :

- a. Komunikasi adalah hal tentang mendeskripsikan bentuk dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi pelaksana kebijakan. Untuk menerapkan kebijakan, instruksi kebijakan yang diberikan harus tersampaikan pada orang yang tepat dan jelas, akurat dan konsisten (Mutiarin dan Zaenudin, 2014:38)
- b. Sumber daya pendukung adalah berkaitan dengan jumlah dari sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Jika sumber – sumber tersebut kurang cukup maka ketentuan atau aturan-aturan akan menjadi lemah, kegiatan pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, serta peraturan/regulasi yang beralasan tidak akan dikembangkan, Edward III (dalam Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N.,2020:20)
- c. Disposition merupakan hal yang berkaitan dengan komitmen akan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari pelaku kebijakan yang mengetahui dan melaksanakannya, namun akan dilihat dari sikap pelaksana kebijakan apakah memang sungguh – sungguh dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai dan diwujudkan Edward III.
- d. Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan para penyelenggara kebijakan publik. Jika struktur birokrasi tidak sesuai maka implementasi kebijakan akan berjalan tidak efektif, Edward III. Struktur Birokrasi meliputi susunan organisasi, wewenang, hubungan

unit organisasi, dan hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya (dalam Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N.,2020:21)

4. Konsep Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah: Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan KLA untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak dijelaskan bahwa KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan anak.

1.6 Metode Penelitian

Dalam pembahasan mengenai Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan yang akan mengungkapkan kondisi sesungguhnya dari objek yang akan diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
2. Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dimana pada tahun 2017 kemarin telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak selama empat kali, sehingga Kota Surabaya menjadi salah satu kota/kabupaten percontohan implementasi program Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya sebagai Leading Sector dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya
4. Tiga (3) wilayah kecamatan yang menjadi pilar project (Kantor Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Benowo)

Adanya penghargaan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Kota Surabaya tidak terdapat kasus kekerasan yang terjadi pada anak, bahkan kasus yang tercatat semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, alasan peneliti melakukan penelitiannya di Kota Surabaya yakni saat ini telah banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik infrastruktur untuk anak-anak, program pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga program penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

Situs penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap kondisi yang sebenarnya dari objek yang diteliti, yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A), Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan dan Benowo yang terlibat. Dinas tersebut dipilih karena merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak serta pelaksanaan program-program

perlindungan yang berkaitan dengan anak sebagai korban dari kekerasan. Lalu tiga (3) kantor kecamatan yang dipilih merupakan beberapa bagian di wilayah Surabaya yang menjadi pilar project.

1.6.2 Subyek Penelitian

Subjek adalah sesuatu hal dapat berupa orang, benda, organisasi yang keadaannya dapat diteliti. Berdasarkan pendapat Arikunto (2016:26), subjek riset ialah subjek yang dituju agar diamati oleh pengamat. Subyek pada riset ini ialah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) di tiap wilayah kantor kecamatan Genteng, kecamatan Wonocolo, dan Kecamatan Benowo.

1.6.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiyono, 2012:141). Peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni Implementasi Program Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan diperlukan pemilihan fokus penelitian. Adapun faktor-faktor penelitian ini di antara lain :

1. Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota

Surabaya:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya:

Faktor pendukung:

1. Logika, digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah diterapkan.
2. Hakikat Kerja yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan Sumber daya manusia, yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Faktor penghambat:

1. Isi Kebijakan, implementasi kebijakan dapat dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.

2. Informasi, informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.
 3. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
 4. Pembagian Potensi, yaitu pembagian potensi antar para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.
3. Dampak Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya.

1.6.4 Sumber Informasi

Menurut Lofland and Lofland (dalam Moleong, 2007:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Informan

Informan merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi berupa jawaban lisan maupun jawaban yang tertulis melalui penanya. Maka dari itu, informan sebagai salah satu

sumber data yang berupa orang per orang dapat dijadikan sumber penelitian yang valid melalui wawancara. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti mengambil satu hingga dua orang yang dijadikan narasumber untuk mewakili instansi yang bersangkutan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
2. Staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, dan Kecamatan Benowo

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa merupakan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami objek dan subyek penelitian secara langsung. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya yang bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A), Kantor Kecamatan Genteng, Kantor Kecamatan Wonocolo, dan Kantor Kecamatan Benowo.

3. Dokumen

Dokumen dalam sumber data menyajikan tanda-tanda berupa angka, huruf, gambar maupun simbol-simbol, yang didapat dari buku, arsip, jurnal, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Profil Kota Surabaya
- b. Profil Pelayanan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- c. RPJMD Kota Surabaya 2022-2026
- d. Renstra Kecamatan Genteng 2016-2022
- e. SK Camat tentang pembentukan forum anak
- f. SK Camat tentang ramah anak & layak anak
- g. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:224). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data, fakta, atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau lokasi penelitian dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati atau meninjau secara cermat dengan disertai pencatatan-pencatatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Dalam penelitian dengan teknik observasi, peneliti akan datang langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dan Tiga (3) wilayah kecamatan yang menjadi pilar project untuk melihat maupun mengamati situasi dan kondisi serta mencatat hal-hal yang diperlukan sesuai dengan judul penelitian yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Moleong (dalam Putra, 2017:49) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Menurut

Gunawan (2015) terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan pihak kedua sebagai pemberi informasi (interviewees/informan). Interviewer bertugas mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan ataupun penjelasan. Sementara itu informan bertugas untuk memberikan keterangan serta penjelasan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai permasalahan dalam penelitian. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal yang sebenarnya serta berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melakukan wawancara kepada:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
2. Staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Benowo

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yang sifatnya melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya yang merupakan hasil analisis dan interpretasi dari data primer yang berkaitan dengan masa lalu. Sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung seperti dokumentasi yang berupa foto, buku-buku, publikasi pemerintah, jurnal, artikel, laporan atau arsip yang menunjang penelitian hingga berbagai situs yang berhubungan dengan informasi yang dicari.

1. Dokumentasi

Gottschalk (dalam Gunawan, 2015:175) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sumber non-insani. Sumber tersebut terdiri dari dokumen dan rekaman. Hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2013:240). Adapun dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah kegiatan di DP5A dan program-program yang mendukung kebijakan KLA di tiap kecamatan..

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, analisis data merupakan suatu usaha atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk pemecahan masalah.

Miles, Huberman dan Saldana (2014:12), mengemukakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Collection, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dan Tiga (3) wilayah kecamatan untuk mengamati serta melakukan pencatatan-pencatatan guna mengetahui secara langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Genteng, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Benowo. Dan pengumpulan data melalui dokumentasi didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti yaitu berasal dari dokumen Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dan Tiga (3) wilayah kecamatan, jurnal, artikel dan publikasi pemerintah.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan cara memilih dimensi-dimensi yang lebih penting, memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah dan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber yaitu implementasi pelaksanaan program pemerintah layak anak di kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Setelah memfokuskan data, langkah selanjutnya yaitu data tersebut disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat berupa deskripsi.

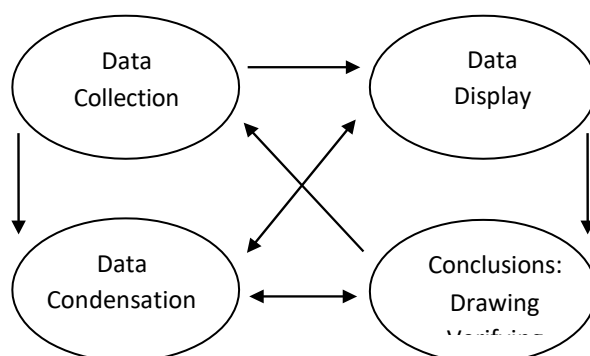
3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian data, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam uraian singkat berdasarkan hasil wawancara yang mendeskripsikan

implementasi program pemerintah tentang layak anak yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak evaluasi yang ditimbulkan dimana selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk naratif.

4. Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Dari penarikan kesimpulan dan verifikasi peneliti mendapatkan hasil dari penyimpulan pada saat wawancara dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Simpulan dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai implementasi program pemerintah tentang layak anak yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak evaluasi yang ditimbulkan.



Gambar 1.1 *Components of Data Analysis: Interactive Model*

Sumber: Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.

1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui proses atau langkah-langkah tertentu agar penelitian tersebut menjadi terstruktur dan bisa berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan persiapan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, persiapan yang dimaksud adalah persiapan tema penelitian, fokus penelitian, sumber data maupun sumber informasi.

2. Tahap Pengambilan Data

Dalam tahap pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan tahap ini peneliti perlu melakukan survei lokasi penelitian terlebih dahulu.

3. Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah dengan cara diteliti dan dianalisis.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam penelitian kualitatif, setelah data diolah dengan cara dianalisis maka akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah ini, peneliti akan menyusun laporan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh.

Tabel 1.1
Langkah-Langkah Penelitian

| No. | Jenis Kegiatan | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan penelitian | | | | |
| 2. | Bimbingan penelitian | | | | |
| 3. | Pengambilan data | | | | |
| 4. | Pengolahan data | | | | |
| 5. | Analisis data | | | | |
| 6. | Penyusunan laporan | | | | |
| 7. | Penyampaian laporan | | | | |

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, hasil penelitian yang sudah ada digunakan sebagai perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan yang tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|------------|--|---|---|
| 1. | Ema Fitri Lubis, Evi Zubaidah tahun 2021, Universitas Islam Riau. "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru" | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan Indikator dari teori Edward III yaitu: 1. Indikator Komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi 2. Sumber daya masih belum adanya anggaran yang mencukupi serta ketersediaan fasilitas penunjang dalam implementasi program 3. Disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal | Peneliti terdahulu menggunakan indikator dari teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu penulis menggunakan dimensi kajian evaluasi formatif |

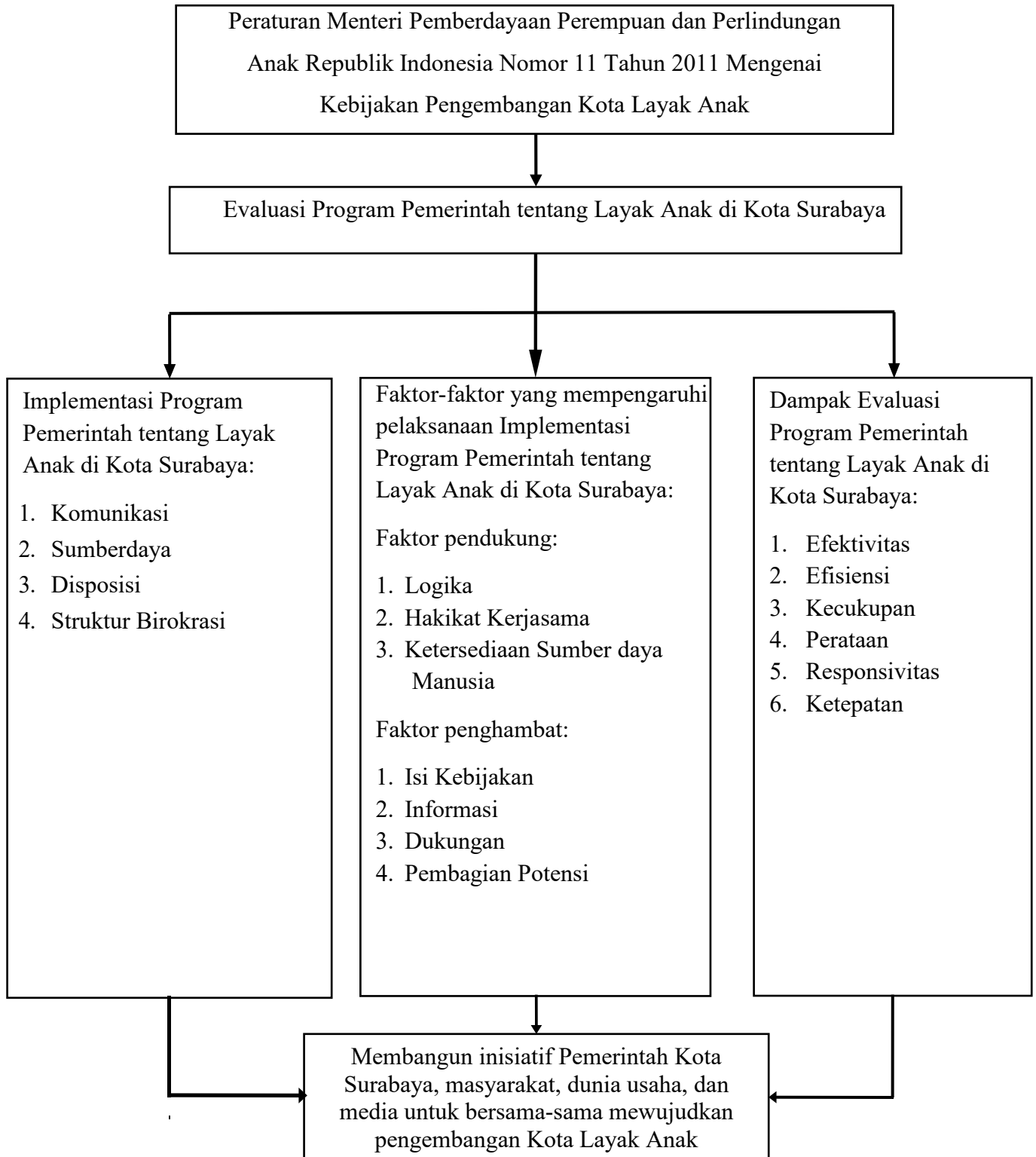
| | | | |
|----|--|---|---|
| | | 4. Struktur Birokrasi perlunya penguatan kelembagaan dalam implementasi program Kota Layak Anak. | |
| 2. | Iis Widyawati, Agus Satmoko Adi tahun 2021, Universitas Negeri Surabaya. “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021”. | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat enam strategi DPPPAB Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bojonegoro 2. Adanya kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3. Adanya peningkatan penyedia lembaga konsultasi bagi keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif 4. Pembuatan infrastruktur ramah anak 5. Adanya pengarusutamaan hak anak 6. Adanya pemantauan dan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun | Hasil temuan penelitian terdahulu memperlihatkan strategi DPPPAB dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara itu hasil temuan penulis menunjukkan terkait evaluasi program Pemerintah tentang Layak Anak |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | Sarah Fitriya Anandasari, Rahmat Hidayat, Mochamad Faizal Rizki tahun 2021, Universitas Singaperbangsa Karawang. “Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi”. | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat 3 elemen yang digunakan menurut Ripley dan Franklin yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi kepatuhan, setiap elemen yang berkaitan selalu mengacu kepada peraturan yang menjadi landasan dalam bergerak melaksanakan penerapan sekolah ramah anak 2. Dimensi kelancaran fungsi, masing-masing lembaga mengetahui bagaimana tugas dan bagaimana harus bersikap sesuai dengan aturan, sehingga nantinya akan menjadi pembiasaan bagi individu yang menjalankan 3. Dimensi terwujudnya kinerja, kehadiran dan keaktifan siswa serta dampak yang diinginkan adalah penurunan kasus kekerasan anak juga menjadikan sekolah sebagai tempat aman bagi tumbuh kembang peserta didik serta sebagai agen pembentuk penerus bangsa. | <p>Hasil temuan penelitian terdahulu menggambarkan keberhasilan dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. Sementara itu hasil temuan penulis menunjukkan terkait evaluasi program Pemerintah tentang Layak Anak</p> |
|----|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | <p>Anggun Prasetya, Abdul Rahman tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Jakarta.</p> <p>“Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)”.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan indikator model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn terdapat 6 dimensi yang diukur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap atau Kecenderungan 5. Komunikasi Antar Organisasi 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik <p>Secara umum pelaksanaan kebijakan Kota Layak di masa pandemi di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Namun demikian, dimensi sumber daya dan komunikasi antar organisasi masih menjadi tantangan terbesar. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya dimensi sumber daya. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum massif, dan pemahaman substansi kebijakan diantara para implementor kebijakan masih perlu ditingkatkan</p> | <p>Peneliti terdahulu menggunakan indikator dari teori Van Meter dan Van Horn yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik. Sementara itu penulis menggunakan dimensi kajian evaluasi formatif</p> |
|----|---|---|--|

| | | | |
|----|--|---|---|
| 5. | <p>Titaniary Nuasmikgi tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Malang. “Proses Pembentukan Kabupaten Trenggalek Sebagai Kota Layak Anak (Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembentukan KLA membutuhkan sebuah tahapan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Pemerintah Daerahnya untuk menyelenggarakan KLA yang diikuti dengan membentuk Gugus Tugas KLA 2. Membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan KLA 3. Pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan sesuai (RAD) yang sudah ada 4. Pemantauan dilakukan pihak Gugus Tugas KLA setiap 3 bulan 5. Evaluasi 6. Pelaporan dilakukan oleh Tim Penilaian KLA dan Kepala Daerah | <p>Hasil temuan penelitian terdahulu menggambarkan tahapan yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan Kota Layak Anak. Sementara itu hasil temuan penulis menunjukkan terkait evaluasi program Pemerintah tentang Layak Anak</p> |
|----|--|---|---|

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3 Tinjauan teoritis

2.3.1 Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

2.3.1.1 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan definisi kebijakan publik menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.
2. Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata

3. David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

2.3.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Teori implementasi menurut George C Edward III (dalam Subarsono, 2015: 90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi, memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah Standar Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Teori implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2015: 94-98) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variable affecting implementation)

Teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2015: 99-100) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi, politik

2.3.1.3 Program Layak Anak

Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

2.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan, dibutuhkan serangkaian proses implementasi yang didukung variabel-variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Berikut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan :

Faktor pendukung implementasi kebijakan menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor, yaitu :

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono terdapat 3 faktor, yaitu :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

2.3.3 Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

2.3.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga kebijakan publik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan harus dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan.

Charles O. Jones mengemukakan bahwa: “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding

and improvement of policy development and implementation”. (Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijaksanaan beserta perkembangannya.) (Charles O Jones, 2004).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan adanya evaluasi maka suatu program atau suatu kebijakan dapat diketahui kelemahannya sejak direncanakan sampai pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi bertujuan untuk pertama, mengukur efek suatu kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut. Kedua, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. Ketiga, memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi. Keempat, memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut William Dunn (1998:608-609) :

1. Fokus Nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi fokus-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu. Ketimbang hasil di

masa depan, evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai instrik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

2.3.3.2 Dimensi Kajian Evaluasi

Menurut Palumbo (Sahya Anggara, 2014:277-278) dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan meliputi penentuan agenda, pendefinisian masalah, *forecasting* (definisi sasaran), pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisis keputusan, desain kebijakan, analisis feasibilitas politik, terminasi,

pooling dan survei, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak, dan implementasi.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini:

1. Evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Menurut Palumbo, pada tahap ini diperlukan dua kali evaluasi.
2. Evaluasi desain kebijakan, untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*), yang bersifat rasional dan terukur.
3. Evaluasi legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan oleh masyarakat/ stakeholder/ kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat, survei dan lain-lain.
4. Evaluasi formatif, dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui sebuah program diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap

pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.

5. Evaluasi sumatif, dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan memberikan dampak nyata pada masalah yang ditangani.

Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi kajian evaluasi, peneliti akan menggunakan dimensi kajian evaluasi formatif dalam penelitian ini. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang memiliki ciri-ciri :

- a. Merupakan evaluasi terhadap proses;
- b. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan;
- c. Menggunakan model-model implementasi;
- d. Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan;

Tujuan evaluasi formatif adalah untuk melihat :

- a. Sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
- b. Penyampaian pelayanannya telah sesuai dengan konsisten spesifikasi program atau tidak;

c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut. (Wayne Parson, 2005:278)

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif antara lain : *effort evaluation*, yaitu mengkaji output dibandingkan dengan input program. *Performance evaluation*, yaitu mengkaji pelaksanaannya sesuai dengan sasaran dan tujuan. *Effectiveness evaluation*, yaitu mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan. *Efficiency evaluation*, yaitu membandingkan biaya dengan output yang dicapai. *Process evaluation*, yaitu mengkaji metode pelaksanaan, aturan, dan prosedur dalam pelaksanaan.

2.3.3.3 Kriteria Untuk Evaluasi

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, peneliti menggunakan tipe-tipe kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1998). Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

| TIPE KRITERIA | PERTANYAAN | ILUSTRASI |
|---------------|--|---|
| Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ? | Unit Pelayanan |
| Efisiensi | Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil | Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat |

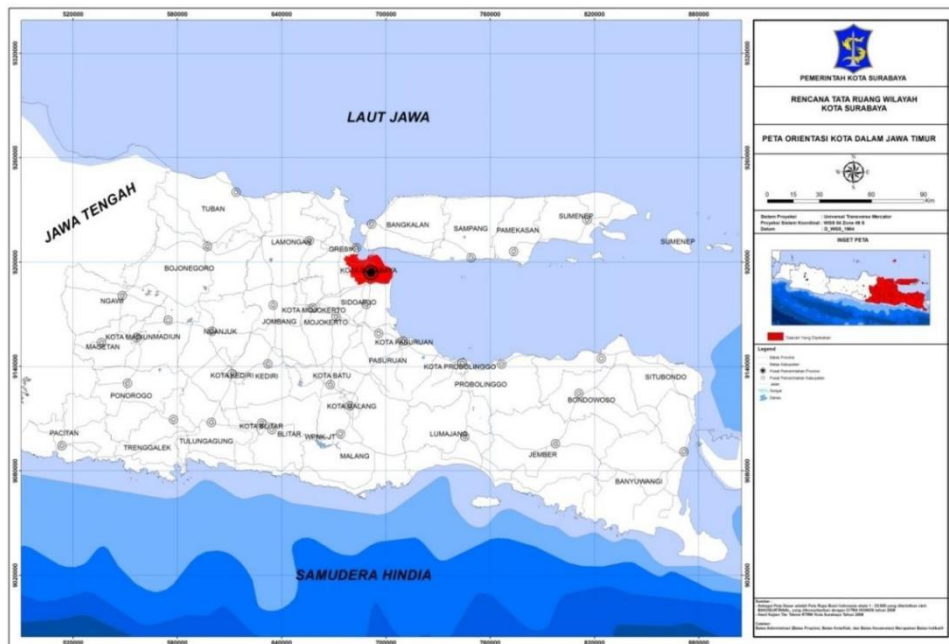
| | | |
|---------------|---|---|
| | yang diinginkan ? | |
| Kecukupan | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah ? | Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II) |
| Perataan | Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ? | Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls |
| Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ? | Konsistensi dengan survei warga negara |
| Ketepatan | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ? | Program publik harus merata dan efisien |

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Surabaya

3.1.1 Kondisi Umum Kota Surabaya



Gambar 3.1 Peta Kota Surabaya

Sumber : <http://www.surabaya.go.id> (diakses pada 01 Juni 2021)

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki luas sekitar 326,37 km² sekaligus menjadi salah satu ibu kota dari Jawa Timur. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surabaya, Populasi penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 mencapai 2.874.314 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki – laki

sejumlah 1.425.168 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.449.146 jiwa, dengan tingkat kepadatan 8.795 jiwa / km².

3.1.1.1 Lambang Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki beberapa julukan yang ada sejak dahulu seperti kota pahlawan yang juga terdapat situs dan lingkungan cagar budaya sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke kota Surabaya.



Gambar 3.2 Lambang Kota Surabaya

Sumber : <http://www.surabaya.go.id> (diakses pada 01 Juni 2021)

3.1.1.2 Visi dan Misi

Visi

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD, masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk mewujudkan visi kota Surabaya yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Visi tersebut yaitu:

**“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”**

Sentosa menggambarkan kota Surabaya diharapkan menjadi kota yang aman, nyaman, sehat, selamat serta damai bagi warganya dalam berkarya dan mengaktualisasi diri sehingga membawa dampak kemakmuran bagi warga Kota Surabaya.

Ber karakter tercermin dalam perilaku warga Kota Surabaya yang tetap memiliki watak, kepribadian yang arif dan tetap mempertahankan budaya serta kearifan local, namun tetap berasaskan falsafah Pancasila.

Berdaya saing global menggambarkan Kota Surabaya sebagai sebuah pusat perdagangan yang menghubungkan jasa antar pulau dan Internasional. Hal ini didukung pula dengan tata kelola pemerintah yang baik, pemerataan akses menuju sumberdaya yang produktif, pembangunan infrastruktur serta utilitas kota yang terintegrasi dengan ekonomi local, inovasi dalam produk dan jasa serta pengembangan industry kreatif yang memiliki pangsa pasar serta daya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dengan fungsi kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman. Dalam penataan ruang harus diperhatikan dengan seksama sistem jaringan jalan dan transportasi sebagai antisipasi resiko bencana serta dalam rangka menjaga kelestarian kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan pemantapan sarana serta prasana lingkungan dan permukiman warga yang sentosa.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi

pembangunan kota berikut :

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas, upaya pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan, meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda, meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum, meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota, mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertahanan dan sistem penataan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, mewujudkan system mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan system

pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasana dan sarana yang berkualitas.

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan, menyediakan rumah tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan, meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energy alternative yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial, mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional, menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan, mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industry.
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sitem

pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, meningkatkan efektivitas perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan cara memantapkan proses dan system perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang didukung TIK, meningkatkan pelayanan public yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif, meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas, meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata.
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien, meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi, mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih / air minum bagi masyarakat.

3.1.2 Kondisi Geografis

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah Selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut dan secara astronomis terletak di antara 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s/d 112°54' Bujur Timur

Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan yang ada di kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga). Secara topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72 % (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8 m LWS, sedang sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di Wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%).

3.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)

3.2.1 Kondisi Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)

3.2.1.1 Sejarah Singkat

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebelumnya dikenal sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) yang mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sosial. Namun, semenjak Januari 2017 Bapemas KB berubah menjadi DP5A. hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Perubahan tersebut didasarkan atas adanya perubahan fungsi dari organisasi yang sifatnya koordinasi menjadi ke teknis.

Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan didalam susunan organisasi serta tugas dan fungsinya sebagai suatu Lembaga pemerintahan. Adapun pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam DP5A dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bidang sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan
3. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan Seksi Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari Seksi Keluarga Bencana, dan Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
5. Bidang Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2.1.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

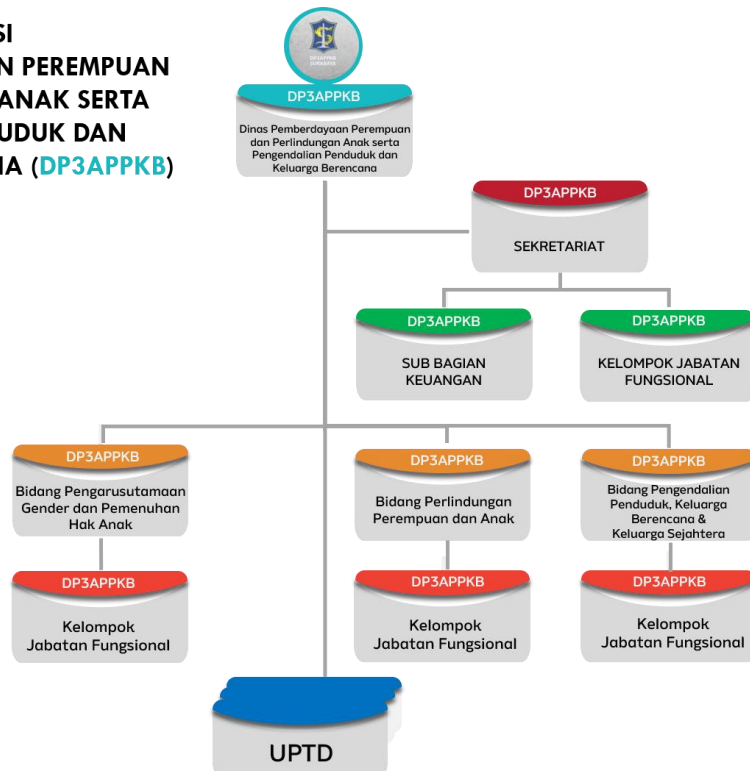
Misi

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

3.2.1.3 Struktur Organisasi

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)**



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)
3.2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Adapun DP5A dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya - Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol.
7. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas.
9. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
12. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

2. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
3. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan;
4. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan perempuan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan;
6. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan;
7. pelaksanaan pendalaman dan penjangkauan permasalahan perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan;
8. pelaksanaan pemetaan terkait pemberdayaan perempuan, Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
9. pelaksanaan analisis dalam upaya penguatan pemberdayaan perempuan;
10. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
11. pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
12. pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
13. pelaksanaan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;

14. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan;
4. menyiapkan bahan pendalaman dan penjangkauan permasalahan perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan di bidang pemberdayaan perempuan;
6. menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan pemberdayaan perempuan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pemberdayaan perempuan;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan;

10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
2. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dengan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
5. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;

9. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesejahteraan Keluarga

Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesejahteraan Keluarga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang kesejahteraan keluarga;
4. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga;

5. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha;
6. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi usaha di bidang kesejahteraan keluarga;
7. pelaksanaan penyusunan rencana program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis bidang kesejahteraan keluarga;
8. pelaksanaan rencana program dan/atau petunjuk teknis dan/atau bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga;
9. pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga;
10. pelaksanaan norma, standar, program dan kriteria (NSPK) pemberdayaan ekonomi keluarga;
11. pelaksanaan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi, kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. penyiapan bahan, sarana dan/atau prasarana dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
13. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, promosi usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
14. penyiapan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga;
15. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan keluarga melalui usaha keluarga;
16. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta

- pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi bidang kesejahteraan keluarga;
17. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi bidang kesejahteraan keluarga;
 18. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
 19. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan rencana program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi keluarga;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, program dan kriteria (NSPK) pemberdayaan ekonomi keluarga;
4. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi, kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
5. menyiapkan bahan, sarana dan/atau prasarana dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;

6. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, promosi usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di seksi pemberdayaan ekonomi;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga seksi pemberdayaan ekonomi;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha skala kota;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi usaha di seksi pemberdayaan ekonomi;
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Ketahanan Keluarga

Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan, koordinasi dan/atau kerjasama, pelaksanaan program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
2. menyiapkan bahan dan analisis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan pelaksanaan tugas ketahanan keluarga;
3. menyiapkan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga;
4. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan keluarga melalui usaha keluarga;
5. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
6. menyiapkan serta melaksanakan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi ketahanan keluarga;
7. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
8. melaksanakan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang ketahanan keluarga;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan keluarga;
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
2. perumuskan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi dan Keluarga Berencana ;
5. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kota;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

7. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana ;
9. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
10. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
11. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
12. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota;
13. pelaksanaan pendampingan program peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
14. pelaksanaan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
15. pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
16. pembinaan dan pembimbingan dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
17. pembinaan dan pembimbingan hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
18. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;

19. pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
20. pembinaan, pembimbingan, sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Kota;
21. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan keluarga berencana;
22. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
23. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
24. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
2. menyiapkan bahan pendampingan program peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
3. menyiapkan bahan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;

5. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan di bidang Keluarga Berencana;
6. menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kota;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
12. menyiapkan bahan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
13. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE)**

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan di bidang dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
4. menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
6. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
7. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Kota;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);

10. menyiapkan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota;
12. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; dan
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

2. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak;
3. pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan hak anak;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. penyiapan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak;
6. pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak;
7. pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
8. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
11. pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak;
12. pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak;
13. pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak; dan
14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
2. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan anak;
3. menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak;
4. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring perlindungan perempuan dan anak;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
10. menyiapkan bahan sinkronisasi pengembangan jaringan perlindungan perempuan dan anak; dan
11. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengarustamaan Hak Anak

Seksi Pengarustamaan Hak Anak mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarustamaan Hak Anak;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di Bidang Pengarustamaan Hak Anak;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarustamaan Hak Anak;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengarustamaan Hak Anak;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarustamaan hak anak;
9. menyiapkan bahan sinkronisasi pengembangan jaringan pengarustamaan hak anak; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.

3.3 Pemerintah Kecamatan Genteng

3.3.1 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Genteng



Gambar 3.4 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Genteng

3.3.2 Kondisi Geografis Kecamatan Genteng

Kecamatan Genteng adalah salah satu kecamatan yang terletak di pusat Kota Surabaya. Daerah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Kantor Kecamatan Genteng beralamat di Jalan BKR Pelajar No. 43 Surabaya dengan luas wilayah 4,04 Km² serta kepadatan jumlah penduduk sebesar 13.491 Jiwa/Km². Kecamatan Genteng

mempunyai lima kelurahan yaitu Kelurahan Embong Kaliasin, Ketabang, Kapasari, Peneleh, dan Genteng.

Kecamatan Genteng mempunyai jumlah total keseluruhan 298 RT dan 61 RW. Kelurahan Embong Kaliasin mempunyai 58 RT dan 12 RW. Kelurahan Ketabang mempunyai 57 RT dan 11 RW. Kelurahan Genteng mempunyai 42 RT dan 11 RW. Kelurahan Peneleh mempunyai 77 RT dan 16 RW. Kelurahan Kapasari mempunyai 64 RT dan 11 RW. Selengkapnya data akan penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Genteng

| Wilayah | Jumlah | |
|--------------------------|-----------|------------|
| | RW | RT |
| Kec. Genteng | 61 | 298 |
| 001 kel. Embong Kaliasin | 12 | 58 |
| 002 Kel. Ketabang | 11 | 57 |
| 003 Kel. Genteng | 11 | 42 |
| 004 Kel. Peneleh | 16 | 77 |
| 005 Kel. Kapasari | 11 | 64 |

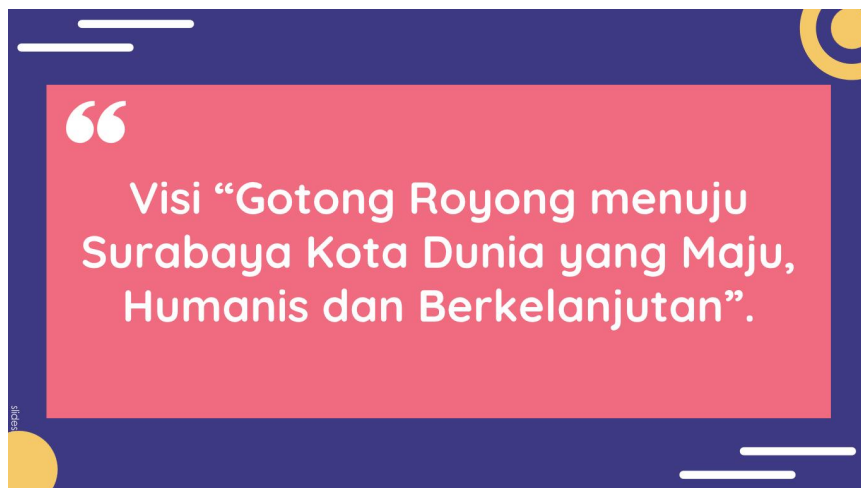
Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah RT terbanyak ada pada Kelurahan Peneleh dengan jumlah 77 RT, sedangkan untuk yang terendah yaitu Kelurahan Genteng dengan jumlah 42 RT. Dari jumlah keseluruhan Kecamatan

Genteng Kota Surabaya mempunyai 298 RT dan 61 RW. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Genteng, Penulis akan sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Luas Wilayah Kecamatan Genteng

| Wilayah | Luas (Km ²) | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kelurahan |
| Kec. Genteng | 4.05 | |
| 001 kel. Embong Kaliasin | | 11 |
| 002 Kel. Ketabang | | 9,8 |
| 003 Kel. Genteng | | 5,3 |
| 004 Kel. Peneleh | | 4,5 |
| 005 Kel. Kapasari | | 3,5 |

3.3.3 Visi dan Misi Kecamatan Genteng

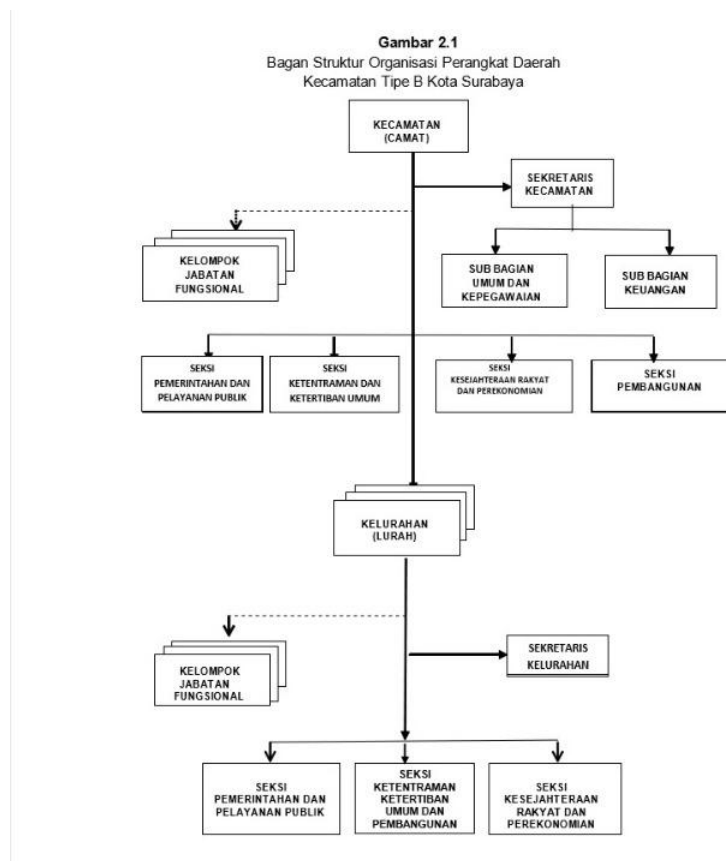


Gambar 3.5 Visi Kecamatan Genteng



Gambar 3.6 Misi Kecamatan Genteng

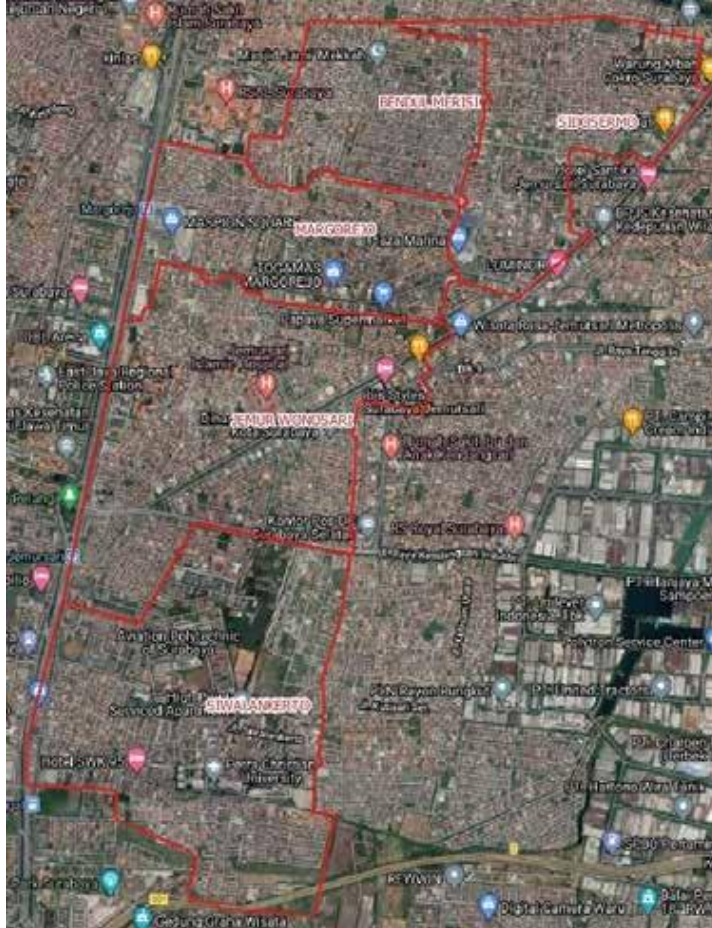
3.3.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.7 Struktur Organisasi Kecamatan Genteng

3.4 Pemerintah Kecamatan Wonocolo

3.4.1 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Wonocolo



Gambar 3.8 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Wonocolo

3.4.2 Kondisi Geografis Kecamatan Wonocolo

Kecamatan Wonocolo adalah salah satu kecamatan yang terletak dalam area Surabaya Selatan. Daerah ini memiliki fungsi utama sebagai kantor pusat pemerintahan dan instansi penting lainnya. Kantor Kecamatan Wonocolo beralamat di Jalan Jemursari II / No. 33 Surabaya dengan luas wilayah 6,78 Km² serta kepadatan jumlah penduduk sebesar 12.044 Jiwa/Km². Kecamatan Wonocolo mempunyai lima kelurahan yaitu Kelurahan Sidosermo, Bendul Merisi, Margorejo, Jemur Wonosari, dan Siwalankerto.

Tabel 3.3
Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Wonocolo

| Wilayah | Jumlah | |
|-------------------------|-----------|------------|
| | RW | RT |
| Kec. Wonocolo | 44 | 229 |
| 001 Kel. Siwalankerto | 6 | 38 |
| 002 Kel. Jemur Wonosari | 10 | 63 |
| 003 Kel. Margorejo | 8 | 36 |
| 004 Kel. Bendul Merisi | 12 | 58 |
| 005 Kel. Sidosermo | 8 | 34 |

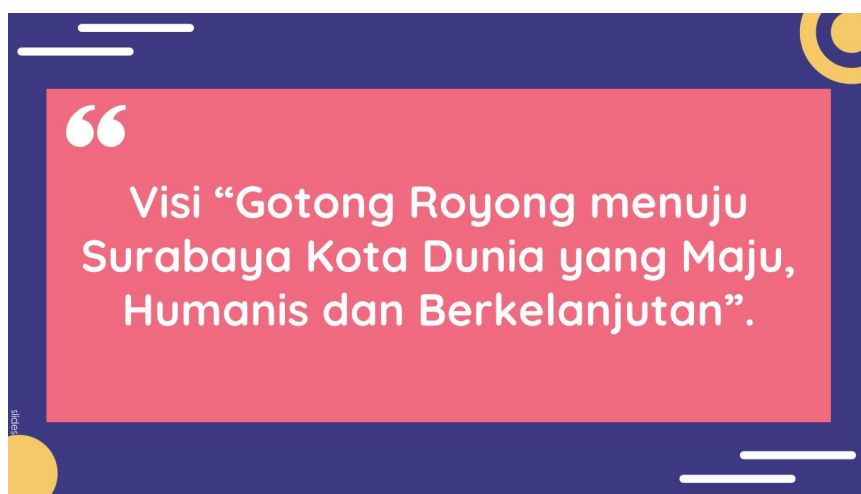
Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah RT terbanyak ada pada Kelurahan Jemur Wonosari dengan jumlah 63 RT, sedangkan untuk yang terendah adalah Kelurahan Sidosermo dengan jumlah 34 RT. Dari jumlah keseluruhan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya mempunyai 229 RT dan 44 RW. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Wonocolo Penulis akan sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Luas Wilayah Kecamatan Wonocolo

| Wilayah | Luas (Km ²) | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kelurahan |
| 040 Kec. Wonocolo | 6.77 | |
| 001 Kel. Siwalankerto | | 1,98 |

| | | |
|-------------------------|--|------|
| 002 Kel. Jemur Wonosari | | 1,64 |
| 003 Kel. Margorejo | | 0,65 |
| 004 Kel. Bendul Merisi | | 0,77 |
| 005 Kel. Sidosermo | | 1,07 |

3.4.3 Visi dan Misi Kecamatan Wonocolo



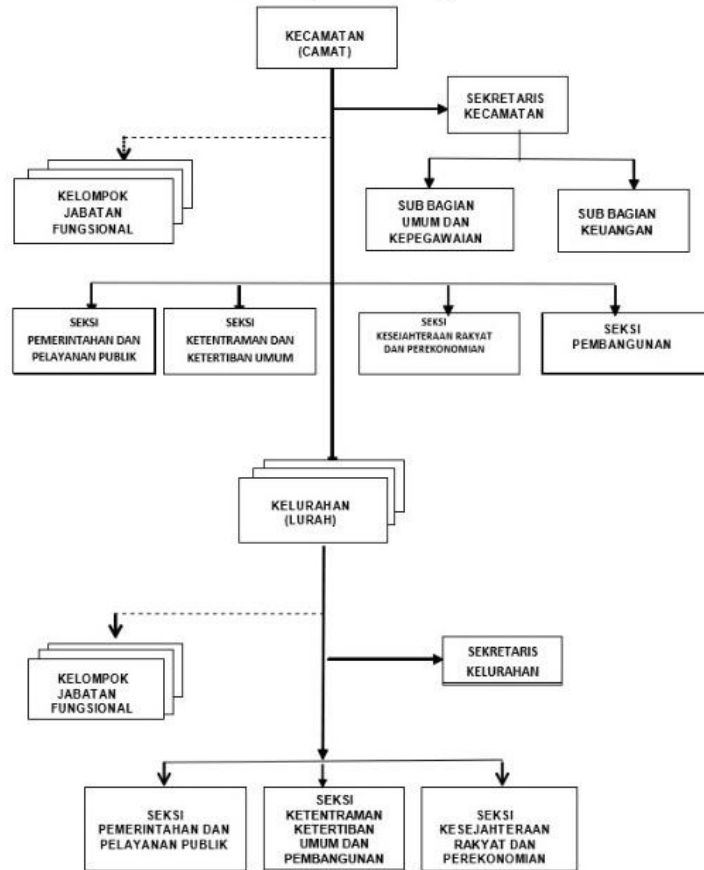
Gambar 3.9 Visi Kecamatan Wonocolo



Gambar 3.10 Misi Kecamatan Wonocolo

3.4.4 Struktur Organisasi

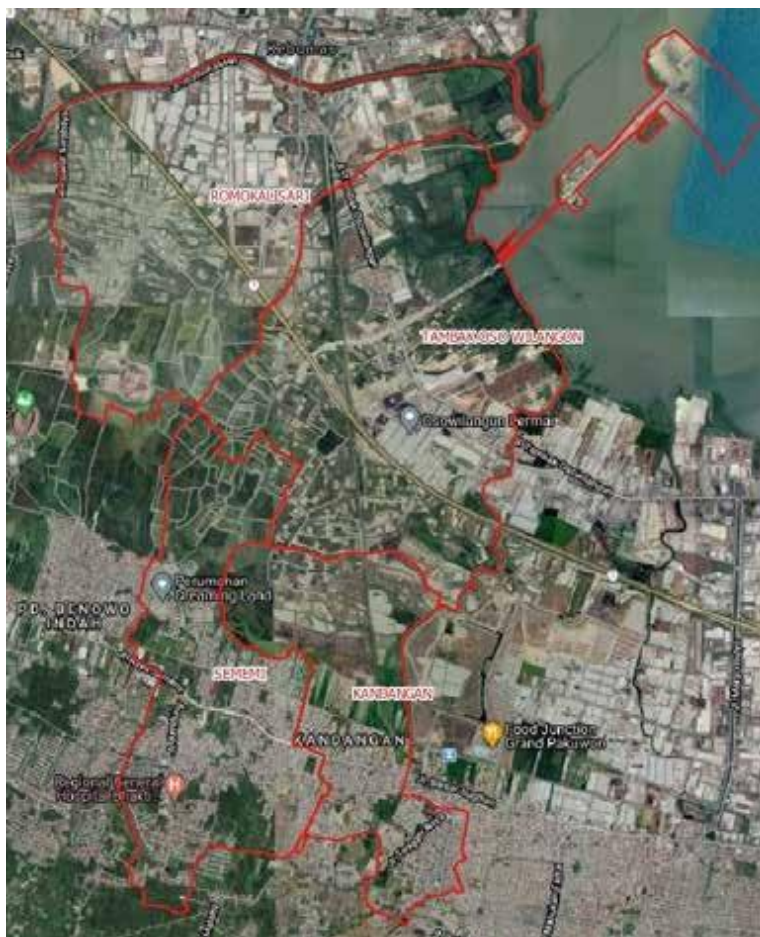
Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 Kecamatan Tipe B Kota Surabaya



Gambar 3.11 Struktur Organisasi Kecamatan Wonocolo

3.5 Pemerintah Kecamatan Benowo

3.5.1 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Benowo



Gambar 3.12 Kondisi Umum Pemerintah Kecamatan Benowo

3.5.2 Kondisi Geografis Kecamatan Benowo

Kecamatan Benowo adalah salah satu kecamatan yang terletak dalam area Surabaya Barat. Dahulu, Kecamatan Benowo merupakan salah satu wilayah "tertinggal" di Kota Surabaya, ini dikarenakan akses jalan yang kurang memadai dan lokasinya lumayan cukup jauh dari pusat kota. Semenjak dibangunnya sarana infrastruktur pelebaran jalan berupa box culvert di sisi jalan utama dan adanya pembangunan perumahan baru serta pergerakan penduduk yang berpindah dari

berbagai luar wilayah dan menetap di wilayah barat Surabaya, maka perlahan-lahan Benowo mulai memiliki potensi yang dapat digali dan semakin berkembang. Kantor Kecamatan Benowo beralamat di Jalan Kendung-Sememi Surabaya dengan luas wilayah 36,48 Km² serta kepadatan jumlah penduduk sebesar 21.47 Jiwa/Km². Kecamatan Benowo mempunyai empat kelurahan yaitu Kelurahan Kandangan, Sememi, Tambak Osowilangun, dan Romokalisari.

Tabel 3.5

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Benowo

| Wilayah | Jumlah | |
|------------------------------|-----------|------------|
| | RW | RT |
| Kec. Benowo | 25 | 153 |
| 004 Kel. Sememi | 9 | 74 |
| 006 Kel. Kandangan | 9 | 56 |
| 007 Kel. Tambak Oso Wilangun | 4 | 12 |
| 008 Kel. Romokalisari | 3 | 11 |

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah RT terbanyak ada pada Kelurahan Sememi dengan jumlah 74 RT, sedangkan untuk yang terendah adalah Kelurahan Romokalisari dengan jumlah 11 RT. Dari jumlah keseluruhan Kecamatan Benowo Kota Surabaya mempunyai 153 RT dan 25 RW. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Benowo, Penulis akan sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Luas Wilayah Kecamatan Benowo

| Wilayah | Luas (Km ²) | |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| | Kecamatan | Kelurahan |
| Kec. Benowo | 23.73 | |
| 004 Kel. Sememi | | 4,11 |
| 006 Kel. Kandangan | | 3,61 |
| 007 Kel. Tambak Oso Wilangon | | 8,46 |
| 008 Kel. Romokalisari | | 7,58 |

3.5.3 Potensi Kecamatan Benowo

Wilayah Tambak Osowilangon yang secara administratif masuk Kecamatan Benowo juga menjadi pusat kawasan kompleks pergudangan dari beberapa banyak perusahaan ternama semisal salah satunya ada Pergudangan Bumi Maspion milik PT Maspion. Selain itu, juga terdapat beberapa perusahaan peti kemas yang melayani jasa logistik dan terintegrasi dengan Terminal Teluk Lamong. Di wilayah Kelurahan Romokalisari, juga terdapat Kompleks Sentra Ikan dan menjadi tempat budidaya kepiting soka serta eco-wisata. Maka dengan ini, secara tidak langsung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah pesisir Romokalisari, Benowo. Wilayah Kendung, Kelurahan Sememi yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Benowo juga terdapat kampung berbasis eco-wisata yaitu "Kampung Semanggi", yang dimana kampung tersebut merupakan tempat sentra budidaya daun semanggi yang selanjutnya diolah

menjadi makanan khas Surabaya menjadi makanan semanggi, pada khususnya wilayah Kecamatan Benowo.

3.5.4 Visi dan Misi Kecamatan Benowo

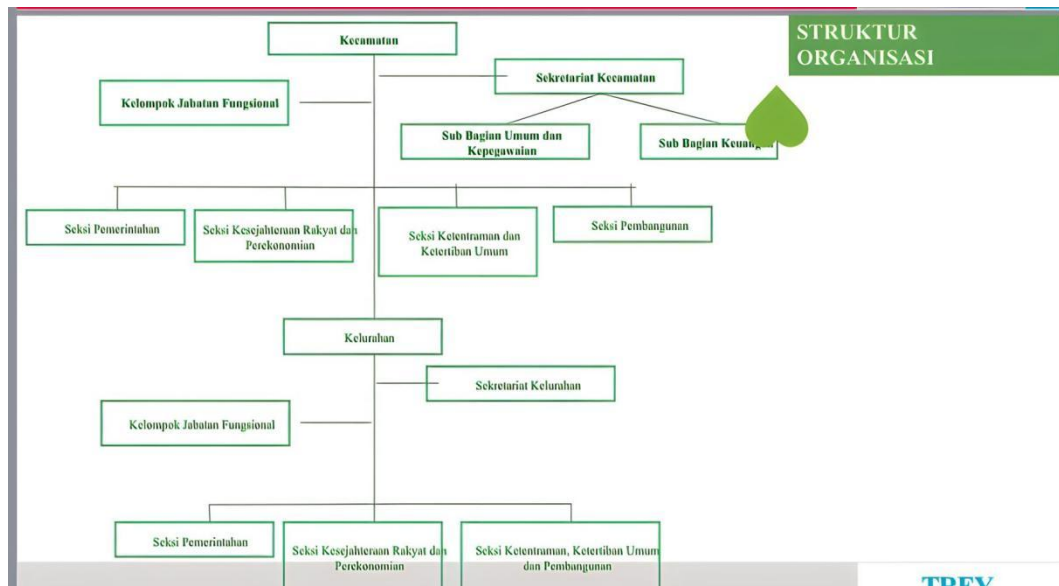


Gambar 3.13 Visi Kecamatan Benowo



Gambar 3.14 Misi Kecamatan Benowo

3.5.5 Struktur Organisasi



Gambar 3.15 Stuktur Organisasi Kecamatan Benowo

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini akan disajikan data-data yang sudah diperoleh selama penelitian di lapangan yang terkait dengan Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada kenyataan dengan fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut yang selanjutnya akan dianalisis sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data yang disajikan ini diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi serta data yang lebih mendalam dari informan. Kemudian dilakukan analisis data dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data sebagai hasil penelitian di lapangan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Dicky Prastya selaku Staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Ibu Rochmi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Genteng, Ibu Vanda selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Wonocolo, dan Bapak Fendy selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KaSi KESPER) Kecamatan Benowo. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

4.1 Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemerintah tentang Layak Anak , pada penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards yang memiliki 4 aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan melalui 4 aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) kepada seluruh pelaksana yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dimensi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Menurut George C. Edwards, komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

Berikut adalah hasil wawancara yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian pelaksanaan kegiatan dalam aspek komunikasi. Peneliti menanyakan tentang komunikasi yang terjadi antara pelaksana kegiatan dan melalui media apa saja dalam menyampaikan pesan.

- Narasumber 1: “Penyampaian informasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dapat dilakukan saat rapat untuk saling memberikan usul apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan/program tentang Layak Anak dan bisa juga melalui *whatsapp*. Mengingat DP3APPKB menjadi salah satu gugus tugas sebagai wakil ketua gugus tugas Kota Layak Anak di Kota Surabaya yang bertugas membantu ketua gugus tugas dalam pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak anak dan pengoptimalan fungsi dan peran anggota gugus tugas. Lalu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bisa dengan sosialisasi yang dibantu oleh kecamatan/kelurahan setempat dan media sosial.” ***(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)***
- Narasumber 2: “Informasi untuk masyarakat berjalan dua arah, saling berkesinambungan yang dimana dapat dilakukan dengan sosialisasi, pemasangan pamflet atau banner, juga melalui media sosial dan jika ada yang membutuhkan motivasi lebih dapat didatangi ke rumahnya. Lalu kami dapat berkomunikasi melalui *whatsapp* dan rapat bersama.” ***(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)***
- Narasumber 3: “Komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan rutin, koordinasi dengan warga terutama Forum/ Komunitas yang memperhatikan perkembangan anak” ***(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)***
- Narasumber 4: “Untuk penyampaian komunikasi sebenarnya sama dengan beberapa kecamatan lain, yaitu dengan sosialisasi maupun koordinasi dengan warga.” ***(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)***

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat dianalisa bahwa proses komunikasi yang berjalan dapat melalui berbagai pintu sesuai dengan prinsip dasar KLA yang tertuang dalam UU KHA. Dinas Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) selaku wakil ketua gugus tugas Kota Layak Anak telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, dengan memberikan informasi melalui media hotline PPA, pelatihan KHA untuk ASN, tenaga kesehatan, sosialisasi pada kepala OPD, Lurah dan Camat yang juga ikut turun andil dalam hal ini.

Lalu peneliti menanyakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik dan saran serta apakah informasi yang diberikan pada masyarakat sudah merata.

Narasumber 1: “Masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran secara langsung dengan menulis dikotak saran, selain itu dapat melalui media sosial seperti e-sapawarga.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Selama ini masyarakat bisa menyampaikan melalui pos curhat tiap kelurahan dan kecamatan serta whatsapp Camat dan Lurah” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Penyampaian kritik dan saran bisa dilakukan secara langsung melalui kami saat ada sosialisasi, lalu melalui Media Pengaduan di Nomor (082131721312).” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Selain melalui media sosial seperti E-Sapawarga, masyarakat juga dapat langsung mengirimkan kritik dan saran melalui kolom feedback. Hingga saat ini masyarakat sudah bisa berkirim pesan melalui pesan chat ke masing-masing seksi dan sub wilayah serta WhatsApp dari Camat dan Lurah.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat dianalisa bahwa, penyampaian kritik dan saran dapat disampaikan langsung ketika ada sosialisasi, dan secara tidak langsung juga dapat disampaikan melalui media pelaporan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya.

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan mungkin saja tujuan telah ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kegiatan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu untuk mendukung jalannya implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi sumber daya yang utama dalam implementasi sebuah kegiatan. Hal ini dikarenakan kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kegiatan disebabkan oleh manusia yang tidak mencukupi, dan tidak kompeten dalam bidangnya. Berkenaan dengan sumber daya manusia maka peneliti menanyakan tentang berapa jumlah staff Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya yang dibutuhkan dan apa saja yang menjadi standar/kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap staff, serta mengenai pelaksanaan kegiatan ini apakah juga membutuhkan kerjasama dari instansi lain.

Narasumber 1: “Tentu, dalam mencapai Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak, seluruh perangkat daerah atau instansi pemerintahan ikut serta dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Tidak hanya instansi pemerintahan namun juga

LSM, Media Massa dan dunia Usaha yang ada di Kota Surabaya juga harus berperan dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak.” ***(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)***

Narasumber 2: “Jelas iya, seluruh pegawai kelurahan dan kecamatan berperan penting dalam program kecamatan layak anak” ***(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)***

Narasumber 3: “Tentu saja kegiatan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Misalnya saja dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan beberapa instansi lainnya.” ***(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)***

Narasumber 4: “Tentunya untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak, seluruh aparatur daerah atau instansi pemerintah terlibat dalam upaya mewujudkan hal tersebut, termasuk seluruh aparat kecamatan dan kelurahan.” ***(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)***

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat dianalisa bahwa, seluruh stakeholder menjadi bagian dalam program Pemerintah tentang Layak Anak. Dalam memaksimalkan kegiatan ini dibutuhkan kerjasama dengan beberapa instansi. Misalnya, Dinas Sosial sebagai instansi yang dapat membantu warga yang kurang mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, kemudian Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai instansi yang bekerja sama dengan program PUSPAGA dalam membantu memberikan pembelajaran secara akademik maupun non-akademik, lalu pihak koramil atau BABINKAMTIBMAS yang membantu dalam pembelajaran terkait cinta tanah air, NKRI, wawasan kebangsaan, pemahaman berlalu lintas dan berkendara yang baik. dan juga BAZNAZ yang membantu terkait permasalahan penahanan ijazah karena faktor ekonomi.

2. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial juga salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan. Beberapa kegiatan kadang memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas terkait dengan kegiatan Kota Layak Anak. Sebagai hasil wawancara, peneliti menanyakan tentang dari mana sumber dana pelaksanaan kegiatan tersebut berasal.

Narasumber 1: “Sumber dana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan terkait Layak Anak berasal dari dana APBD yang sudah diperincikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Sumber dana kegiatan berasal dari APBD Kota Surabaya.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Untuk anggaran sendiri biasanya bisa dari bantuan pribadi atau swadaya.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Jelasnya, sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ramah anak berasal dari dana APBD” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Layak Anak berasal dari dana APBD. Dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program diantaranya sarana dan prasarana seperti contoh pemberian amunisi dan nutrisi bagi balita stunting dan ibu menyusui.

Kemudian untuk dana diluar perencanaan dapat berasal dari iuran pribadi maupun swadaya.

3. Sumber daya waktu

Sumber daya waktu juga menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan. Apabila tidak dapat mengatur berapa lamanya waktu yang dikerjakan maka kegiatan yang akan dilakukan tidak dapat terealisasikan dengan cepat dan tepat. Peneliti menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada kegiatan layak anak ini.

Narasumber 1: “Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan hingga permasalahan seperti stunting dari aspek kesehatan dan keluarga miskin dari aspek kesejahteraan bisa terselesaikan.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Pelaksanaan program KLA akan tetap dijalankan dengan maksimal dan sesuai dengan rencana yang difokuskan kepada perlindungan perkembangan ibu dan anak.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Pelaksanaan program akan terus dijalankan dan difokuskan kepada perlindungan perkembangan ibu dan anak.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Dengan adanya kebijakan KLA ini diharapkan agar tujuan bisa tercapai yaitu memberikan segala proses pembangunan dari awal perencanaan dengan memperhatikan kelayakan bagi para anak-anak.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan

maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas, khususnya di Kota Surabaya. Maka dari itu juga dibutuhkan lebih dari 1 stakeholder untuk menunjang pelaksanaan program serta tersedianya anggaran khusus untuk kepentingan anak, agar tujuan kecamatan layak anak tercapai, mengingat anggaran APBD sangat minim untuk mengentaskan permasalahan di klaster 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan.

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yaitu pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, namun mereka juga harus memiliki komitmen yang pasti dalam melaksanakan kebijakan. Apabila implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, namun jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih diatas. Berikut adalah hasil wawancara yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sikap implementor dalam implementasi kegiatan layak anak. Peneliti menanyakan tentang bagaimana komitmen yang dijalin oleh para implementor dan adakah evaluasi yang dilakukan jika terjadi beberapa masalah.

Narasumber 1: “Komitmen memang yang terpenting dalam melaksanakan tugas. Kami sebagai pelaksana juga berkomitmen melalui berbagai

peraturan dan kebijakan yang telah berperspektif pada kepentingan anak. Saya rasa para stakeholder juga memiliki komitmen yang baik, apalagi mereka berangkat dari hati. Kami selalu mendukung dan memberikan masukan serta menerima masukan dari para stakeholder yang nantinya mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi atau penyusunan program. Biasanya evaluasi dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.” **(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)**

Narasumber 2: “Di tingkat Kecamatan Genteng selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi dan selalu berupaya memperhatikan hak anak” **(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)**

Narasumber 3: “Di tingkat Kecamatan Wonocolo selalu berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami selalu bekerja dengan hati, dan selalu membantu semaksimal mungkin. Rapat evaluasi atau rapat yang lainnya biasanya diadakan 3 bulan sekali untuk membahas setiap kegiatan yang kami lakukan. Tetapi jika memang ada informasi baru, ya bisa menyesuaikan waktunya” **(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)**

Narasumber 4: “Kami para pelaksana juga berkomitmen terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kami selalu mendukung dan memberikan saran serta menerima masukan dari pemangku kepentingan, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi.” **(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)**

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa terjalin komitmen yang baik. Hal ini ditandai dengan saling menerima pendapat satu sama lain, dan tidak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Ketika ada kendala maupun hambatan mereka selalu mendiskusikan untuk menemukan jalan keluarnya. Evaluasi pun diadakan setiap kurang lebih 3bulan sekali. Para stakeholder yang menjalankan selalu bekerja dengan hati dan berkomitmen untuk tetap membantu dalam proses kebijakan pengembangan Kota Layak Anak.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam pelaksanaan kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak bertolak belakang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi rumit yang mengakibatkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berikut adalah hasil wawancara yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan struktur birokrasi dalam implementasi kegiatan layak anak. Peneliti menanyakan tentang bagaimana struktur birokrasi dalam kegiatan ini dan apa saja SOP untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang maksimal.

Narasumber 1: “Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terlalu rumit. Karena jika dilihat dari bawah mulai masyarakat yang menyampaikan keluhan ke tingkat kelurahan dan kecamatan, nantinya dari mereka akan diteruskan kepada kami, lalu kami akan diskusikan bersama dan meminta keputusan pada pimpinan, lalu jika memerlukan bantuan langsung dibantu untuk menjembatani dan menghubungkan dari pihak bawah akan sampai ke pimpinan sehingga koordinasi dan pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. SOP yang ada juga sudah sangat jelas, tinggal melaksanakan saja.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Dalam SOP sudah dijelaskan apa saja tugas yang harus kami kerjakan. Struktur birokrasi juga efektif, misalnya kalau dari bawah mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, lalu ke pengelola program tersebut, lalu ke pimpinan. Kalau

memerlukan dinas lain maka akan segera dihubungkan.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Terkait struktur birokrasi saya rasa sudah efektif, karena memang sudah dijelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Tentunya kami menjalankan tugas dengan SOP yang berlaku, dan itu juga sudah efektif.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, struktur birokrasi yang ada di dalam kegiatan Layak Anak tidak berbelit karena jika dilihat dari bawah maka informasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan diteruskan kepada pengelola program, kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan. Apabila memerlukan bantuan dari dinas yang lain misalnya Dinas Sosial maka akan dihubungkan kepada dinas terkait. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur terdapat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut berisi tentang tugas para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain seperti, menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis kegiatan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan pemantauan dan pengkoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan pemantauan dan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Selain itu pada peraturan tersebut juga terdapat dasar pelaksanaan kegiatan Layak Anak yaitu, UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, Undang-undang 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 21), serta Perpres 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di dalamnya akan selalu memiliki resiko untuk gagal. Kegagalan dalam hal pelaksanaan kebijakan belum tentu dikarenakan lemahnya kebijakan, namun dapat terjadi karena faktor-faktor diluar organisasi. Berikut ini merupakan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan faktor pendukung implementasi program pemerintah tentang layak anak di kota Surabaya. Menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor pendukung yaitu, Logika, Hakikat Kerjasama, dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

a. Logika

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan logika: Apakah kegiatan layak ini telah berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut?

Narasumber 1: “Sudah sesuai. Karena tujuannya sendiri berfokus pada anak. Nah sampai saat ini dengan berjalannya kegiatan ini, sudah banyak membantu mengentaskan permasalahan salah satunya contohnya yaitu dengan adanya peningkatan anak yang sembuh dan tingkat penurunan angka stunting.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Menurut kami, kegiatan ini sudah sesuai dengan tujuan awal. Meskipun masih sering ditemukan masalah-masalah yang terjadi di

lapangan, tapi kami harus berusaha untuk memaksimalkan agar hasilnya lebih terlihat” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Selalu dilakukan kegiatan seputar dengan pemenuhan hak-hak anak. Meski masih ada masalah tapi masalah yang ada dapat diselesaikan.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Kegiatan ini berjalan sesuai rencana. Kegiatannya selalu tentang realisasi hak-hak anak. Meski masih ada masalah, namun masalah yang ada bisa diselesaikan.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa kegiatan Layak Anak ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dicontohkan dengan meningkatnya angka keberhasilan penurunan stunting di Kota Surabaya. Meskipun masih sering ditemukan hambatan/kendala namun para stakeholder selalu berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

b. Hakikat Kerjasama

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan hakikat kerjasama: Apakah seluruh pelaksana kegiatan telah melakukan kerjasama yang baik?

Narasumber 1: “Selama ini seluruh stakeholder dalam mewujudkan Kota Layak anak telah melakukan kerja sama yang baik dengan bagaimana seluruh instansi pada program dan kegiatannya telah melibatkan partisipasi anak dalam tahap perencanaannya.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Selama ini kerja sama terjalin dengan sangat baik. Setiap ada masalah selalu kami bicarakan dengan seksama hingga menemukan solusi dan jalan terbaik. Semoga kedepannya jalinan kerjasama yang baik ini akan selalu terjaga dan kompak selalu.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Sejauh ini, semua pemangku kepentingan telah bekerja sama dengan baik dalam implementasi Kota Layak Anak, karena semua instansi telah memasukkan partisipasi anak dalam tahap perencanaan dalam program dan kegiatannya. ” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra*

Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)

Narasumber 4: “Kolaborasi sejauh ini berjalan sangat baik. Jika ada masalah, kami akan membicarakannya sampai kami menemukan solusi dan jalan terbaik.” ***(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)***

Kerja sama adalah mencapai suatu tujuan yang dilakukan secara bersama-sama dan akan mencapai hasil dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, kerja sama yang dilakukan antara pelaksana kegiatan sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan beberapa masalah kecil yang wajar terjadi, seperti kesalahpahaman dan perbedaan pendapat satu sama lain. Kerja sama merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Apabila kerja sama yang terjalin kurang maksimal maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Ketersediaan Sumber Daya

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia: Apakah pelaksana kegiatan memiliki komitmen yang baik dan kompetensi yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut?

Narasumber 1: “Tentu sudah ya, seluruh SDM stakeholder telah dilatih konvensi hak anak sehingga para SDM tersebut telah memahami kepentingan serta pemenuhan hak anak.” ***(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)***

Narasumber 2: “Ya, dilakukan dengan baik.” ***(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)***

Narasumber 3: “Komitmen dan Kompetensi pelaksana sangat baik, dalam pelaksanaan di lapangan kami sudah terlatih untuk menghadapi berbagai kondisi.” ***(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)***

Narasumber 4: “Yang pasti komitmen yang terjalin sudah cukup baik.” ***(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)***

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, jika memiliki kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi serta kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, komitmen yang terjalin cukup baik. Hal ini ditandai dengan saling memberikan loyalitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu para stakeholder saling membantu satu sama lain.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Menurut Bambang Sunggono terdapat 4 faktor, yaitu Isi Kebijakan, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi. Berikut ini merupakan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan faktor pendukung implementasi program pemerintah tentang layak anak di kota Surabaya.

a. Isi Kebijakan

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan isi kebijakan: Apakah seluruh kegiatan yang disampaikan dalam program Pemerintah tentang Layak Anak mudah dipahami oleh masyarakat?

Narasumber 1: “Dengan adanya para stakeholder program Layak Anak ini mudah dipahami masyarakat karena stakeholder dapat menjalin komunikasi langsung sehingga tercipta komunikasi yang lebih personal agar masyarakat lebih mudah memahami arahan yang diberikan.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Melalui para stakeholder ini masyarakat lebih jauh contohnya tentang bahaya stunting dan pencegahannya.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Mudah dipahami. Karena selain bersosialisasi secara umum, kami juga berdiskusi kecil dengan masyarakat menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Jadi juga mendengar keluhan tentang permasalahan anak disekitar mereka.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Kehadiran stakeholder dalam program ramah anak memudahkan masyarakat untuk memahami, karena stakeholder dapat menjalin komunikasi secara langsung, menciptakan komunikasi yang lebih personal, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami instruksi yang diberikan.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Program Layak Anak yang disampaikan para stakeholder menggunakan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat di Kota Surabaya. Selain dengan pendampingan korban, mereka juga memberikan berdiskusi kecil dengan masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerja sama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan anak di sekitar mereka agar segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Hal ini juga akan membantu penyelesaian angka kejahatan dan kekerasan anak di kota Surabaya yang tanpa kita sadari saat ini Surabaya mendapat predikat Kota Layak Anak Kategori Utama.

b. Informasi

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan informasi: Dalam penyampaian informasi antar-pelaksana, masih adakah kesalahpahaman atau missed-komunikasi?

Narasumber 1: “Bagi stakeholder yang telah memiliki perspektif yang sama terkait kepentingan serta pemenuhan hak anak, dalam penyampaian informasi yang terkait mewujudkan kota layak anak semuanya telah bersinergi sehingga informasi yang disampaikan bisa memiliki satu suara yang sama yakni terkait bagaimana menjadi anak sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Hampir tidak ada mis-komunikasi karena kompetensi yang dimiliki para pelaksana sangat baik, beberapa komunikasi juga efektif mengingat struktur birokrasi yang tidak bertele-tele seperti yang sudah dijelaskan tadi.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Mis-komunikasi biasanya terjadi tapi tidak sering. Biasanya kalau ada komunikasi yang harus dilakukan melalui teknologi modern seperti e-mail, nah itu terkadang susah untuk memahami.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Terkadang ada tapi tidak sering dan tidak terlalu menjadi kendala bagi kami.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dalam sebuah komunikasi, makna dan proses merupakan dua faktor penting.

Karena kedua kata tersebut sangat menentukan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari aktivitas komunikasi. Jika tepat memaknai pesan yang disampaikan dalam komunikasi, maka komunikasi akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Namun, sebaliknya apabila tidak dapat memaknai pesan yang disampaikan dalam komunikasi, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan yang biasa disebut dengan missed-komunikasi. Dalam konteks hubungan komunikasi antar stakeholder yang berjalan selama ini tentu terdapat masalah meskipun tidak sering. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor usia, pola pikir, sifat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam penggunaan media komunikasi online, terkadang ada salah satu anggota yang tidak dapat menggunakan dengan maksimal, yang mengakibatkan tidak mendapatkan informasi secara jelas. Namun, di samping itu komunikasi yang terjalin sudah efektif, karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya secara bersama.

c. Dukungan

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan dukungan: Bagaimana dukungan dari masyarakat? Apakah masyarakat memberikan *feedback* yang positif?

Narasumber 1: “Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota Surabaya sebagai kota layak anak terlihat dari bagaimana pengimplementasian indikator-indikator kota layak anak pada level kelurahan di seluruh kelurahan seperti pada contoh di kota Surabaya pada Kampunge Arek Suroboyo

ramah Perempuan dan Anak.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengembangan KLA seperti peran serta kader masyarakat dalam satgas dan juga peran RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Tentunya masyarakat sangat mendukung akan hal ini. Mereka memberi fasilitas dan menanggapi dengan respon yang positif.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Masyarakat memberikan feedback serta dukungan yang baik terhadap program ini, mereka berharap tidak akan ada lagi kasus baru yang menyangkut pemenuhan hak-hak anak.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dukungan yang berasal dari masyarakat di Kota Surabaya tentu sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kegiatan program pemerintah tentang layak anak. Dukungan tersebut dapat berupa peran serta kader masyarakat dalam satgas dan juga peran RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat. Yang dimana, masyarakat sangat mendukung akan hal ini, dan mereka memberi fasilitas serta menanggapi dengan respon yang positif.

d. Pembagian Potensi

Pertanyaan tentang faktor pendukung berdasarkan pembagian potensi: Apakah pembagian tugas dalam melaksanakan implementasi sudah sesuai dengan potensi masing-masing pelaksana?

Narasumber 1: “Setiap Perangkat Daerah telah mewujudkan bagaimana program serta kegiatan pada masing-masing instansi telah ramah dan peduli terhadap anak. Sehingga perlindungan serta pemenuhan hak anak telah terimplementasikan dalam rencana program kerja masing-masing instansi dan ini telah disesuaikan pada tugas dan fungsi masing-masing instansi.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Pembagian tugas sudah sesuai dengan kemampuannya. Rata-rata kami semua memiliki kemampuan yang baik untuk melaksanakan tugas.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Masing-masing dari kami sudah bertugas sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk saling membantu satu sama lain.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Tentunya sudah sesuai dengan kemampuan kami agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Pembagian tugas harus dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Dalam hal pembagian tugas antar stakeholder sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing staff. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

4.3 Dampak Evaluasi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Evaluasi kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang lebih dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Melalui evaluasi akan ditemukan letak keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan, atau harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan evaluasi formatif menurut William N. Dunn (1999-609), yang terdiri dari 6 aspek-aspek kinerja yang harus dievaluasi.

a. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh hasil yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan layak anak di Kota Surabaya maka peneliti memberikan pertanyaan yang berpedoman pada pendapat William N. Dunn yang menyatakan bahwa efektivitas berarti, apakah hasil yang ingin dicapai. Pertanyaan tentang efektivitas: Apakah pelaksanaan kegiatan layak anak telah efektif?

Narasumber 1: “Pelaksanaan program kegiatan yang Layak Anak di Kota Surabaya telah diimplementasikan pada setiap kegiatan di seluruh perangkat daerah di Kota Surabaya sehingga dalam mencapai predikat Kota Surabaya yang Layak Anak sinergi dari seluruh perangkat Daerah harus telah berjalan dan hal tersebut sangat efektif dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota yang Layak anak.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Kegiatan ini menurut kami selalu diupayakan berjalan secara efektif.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Tentu efektif, karena dengan adanya kegiatan ini bisa mengentaskan berbagai masalah anak yang menjadi prioritas kami.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Sejauh ini kegiatan yang dilakukan telah efektif. Para stakeholder selalu bekerjasama untuk mengembangkan kegiatan mereka agar lebih baik. Dan selalu berdiskusi dengan kami jika ada kendala.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa kegiatan layak anak ini sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui kerjasama yang terjalin baik antar pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) cukup terbantu dengan adanya para stakeholder tersebut. Melalui para stakeholder

maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan KLA yaitu menjadikan wilayah yang ramah anak.

Pertanyaan tentang efektivitas: Apakah pelaksanaan kegiatan Layak Anak telah sesuai dengan SOP?

Narasumber 1: “Selama ini yang kita jalankan bersama sudah sesuai SOP. Tetapi kita tetap selalu mengadakan evaluasi bersama untuk mencapai hasil kegiatan yang lebih baik lagi” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Kami selalu mengupayakan kegiatan berjalan sesuai dengan panduan peraturan yang berlaku.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Sudah sesuai SOP. Meskipun terjadi beberapa kendala dilapangan, namun masih dapat terselesaikan dengan baik.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Saya yakin tentunya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, pelaksanaan kegiatan Layak Anak sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan para stakeholder akan terus mengupayakan kegiatan berjalan sesuai dengan panduan peraturan yang tertera.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan suatu rencana dengan yang telah terealisasikan. Untuk mengetahui efisiensi kegiatan layak anak di Kota Surabaya maka peneliti memberikan pertanyaan yang berpedoman pada pendapat William N. Dunn yang menyatakan bahwa efisiensi yaitu, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pertanyaan tentang efisiensi: Bagaimana efisiensi dari pelaksanaan kegiatan layak anak?

Narasumber 1: “Dalam pelaksanaan berbagai program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, efisiensi yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya yaitu dengan bersinergi bersama seluruh Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Dengan seluruh Perangkat Daerah mengembangkan program serta kegiatan yang ramah anak pada masing-masing instansi nya maka Kota Surabaya akan terwujud sebagai Kota Layak Anak.” ***(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)***

Narasumber 2: “Efisiensinya bagus. Dalam pelaksanaannya tidak berbelit-belit, namun langsung berupa aksi nyata sehingga tujuan dapat tercapai dengan tepat sasaran.” ***(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)***

Narasumber 3: “Tentu efisien dengan mengintegrasikan program layak anak antar OPD, kecamatan dan kelurahan.” ***(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)***

Narasumber 4: “Cukup efisien dari sarana dan prasarana pendukung yang secara maksimal serta pelaksanaan yang sudah sesuai rencana.” ***(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)***

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, efisiensi dalam pelaksanaan tidak berbelit-belit dan cukup tepat dalam penyelesaian masalah. Misalnya untuk mengatasi permasalahan pada anak yang kekurangan dalam faktor ekonomi maka akan segera dilaporkan dan dihubungkan kepada Dinas Sosial agar diberikan bantuan permakanan dan bantuan sosial lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kira-kira membutuhkan waktu paling lambat 1 bulan. Selain itu, para stakeholder juga membantu anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan akan dihubungkan ke Dinas Pendidikan, agar si anak tersebut tetap dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pertanyaan tentang efisiensi: Bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak kedepannya agar lebih efisien?

Narasumber 1: “Dengan cara memaksimalkan koordinasi antar OPD, kecamatan dan kelurahan.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Mungkin bisa dengan sering-sering memberikan pelatihan agar lebih memahami terkait pemenuhan hak-hak anak.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Dengan cara berkolaborasi dengan pengurus LPMK, forum anak, Pihak Polsek dll.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Tetap memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, dengan tidak menunda-nunda pekerjaan dan membagi tugas agar lebih cepat terselesaikan.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa efisiensi dapat terjadi bila seluruh pihak mampu berkolaborasi dan berkomitmen untuk menciptakan kota layak anak dengan 3 poin : pencegahan kekerasan dan memberikan perlindungan bagi anak, menciptakan program-program yang menjunjung kreativitas anak dan memberikan kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan tersebut serta monitoring kegiatan anak terutama yang dilaksanakan larut malam dan berpotensi menimbulkan hal negatif.

c. Kecukupan

Pertanyaan tentang kecukupan: Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?

Narasumber 1: “Hasil yang diinginkan tentunya permasalahan terkait anak bisa tuntas. Namun hal ini harus dilakukan tahap demi tahap.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Harapan kami ingin bisa memenuhi semua indikator kecamatan layak anak.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 2: “Belum memuaskan namun kami tetap berusaha keras untuk mengatasi masalah yang ada.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonoclo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Pencapaian yang diinginkan tentunya mengentaskan permasalahan anak, tapi untuk mencapai itu semua tidak mudah. Satu persatu permasalahan harus terselesaikan terlebih dahulu.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Hasil yang diinginkan dari berjalannya kegiatan ini yaitu Kota Surabaya tuntas dalam hal permasalahan terkait anak. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, pencapaian kegiatan Layak Anak ini cukup membantu pemerintah untuk mencapai predikat sebagai Kota Layak Anak. Memang kasus di Kota Surabaya belum berkurang secara drastis, namun setidaknya sudah ada peningkatan angka keberhasilan dalam kegiatan ini.

d. Perataan

Pertanyaan tentang perayaan: Apakah kegiatan Layak Anak telah dilakukan secara merata di Kota Surabaya?

Narasumber 1: “Ya, Program dan Kegiatan yang layak anak telah dilaksanakan seluruh perangkat Daerah di Kota Surabaya.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Kegiatan ini dilakukan cukup merata di Surabaya.” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Kami upayakan untuk merata di seluruh kota Surabaya.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Kami selalu berupaya agar kegiatan ini merata di seluruh Kota Surabaya.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Pemerataan sebuah kegiatan diperlukan untuk menyuksekkan sebuah tujuan dari kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dikatakan merata apabila seluruh masyarakat

mendapatkan fasilitas dan hasil yang sama. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa saat ini program Layak Anak telah tersebar secara merata di seluruh kota Surabaya. Terlebih tidak hanya berpangku pada 1 stakeholder saja melainkan beberapa instansi ikut andil di dalamnya, hal ini tentunya semakin memudahkan dalam pengentasan permasalahan terkait anak di kota Surabaya.

e. Responsivitas

Pertanyaan tentang responsivitas: Apakah hasil kegiatan Layak Anak mendapat respons yang baik dari masyarakat dan memberikan dampak yang baik juga pada masyarakat?

Narasumber 1: “Dampak yang dihasilkan dari program layak anak kepada masyarakat adalah semakin meratanya pembangunan yang ramah anak pada infrastruktur serta semakin banyaknya program kegiatan yang ramah anak sehingga banyak anak yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut.” *(Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023)*

Narasumber 2: “Respon dari tentunya sangat masyarakat baik dan tentunya ada dukungan mereka seperti yang saya katakan yaitu dari peran serta kader masyarakat dalam satgas dan juga peran RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat” *(Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023)*

Narasumber 3: “Cukup baik respon mereka. Dampanya bagi mereka, mereka lebih aktif untuk segera memberitahukan kepada kami terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, dengan begitu mereka juga lebih peka dan peduli terhadap sesama.” *(Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023)*

Narasumber 4: “Program ini sangat membantu masyarakat sekitar untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang pemenuhan hak anak, dan tentunya mereka sering menginformasikan jika disekitar terjadi permasalahan.” *(Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023)*

Dalam sebuah kegiatan tentu memerlukan respon yang positif dari berbagai kalangan, tidak hanya dari pelaksana saja, respon dari masyarakat pun juga sangat penting. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa,

masyarakat sangat menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak dan masyarakat juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang pemenuhan hak anak. Selain itu masyarakat juga menjadi peka dan peduli terhadap keadaan sekitar. Dampak yang dihasilkan dari program layak anak kepada masyarakat tentunya adalah semakin meratanya pembangunan yang ramah anak pada infrastruktur serta semakin banyaknya program kegiatan yang ramah anak sehingga banyak anak yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

f. Ketepatan

Pertanyaan tentang ketepatan: Apakah pelaksanaan kegiatan Layak Anak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Narasumber 1: “Tujuan dari terselenggaranya program serta kegiatan yang layak anak adalah menyediakan pemenuhan hak serta perlindungan bagi anak sehingga mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak.” (*Pak Dicky, selaku staff DP5A Kota Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023*)

Narasumber 2: “Sudah sesuai. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Misalnya seperti pengawasan dan strategi pada anak.” (*Ibu Rochmi, selaku Kasi Kesra Kecamatan Genteng, wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023*)

Narasumber 3: “Tentu sesuai. Setelah diadakannya kegiatan ini tingkat permasalahan pada anak menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan awal kegiatan ini telah tercapai.” (*Ibu Vanda, selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonocolo, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023*)

Narasumber 4: “Kami terus mengupayakan agar kegiatan Layak Anak ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu khususnya untuk perlindungan anak.” (*Pak Fendy, selaku Kasi Kesra Kecamatan Benowo, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023*)

Kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat di analisa bahwa, kegiatan Layak Anak yang saat ini sedang berjalan sudah cukup sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan melalui berkurangnya angka permasalahan yang terjadi pada anak di kota Surabaya.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui beberapa dampak-dampak evaluasi kegiatan layak anak di Kota Surabaya, antara lain yaitu:

1. Dampak Sosial

Dampak sosial disini merupakan dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial antara anak-anak yang telah menjadi korban dengan masyarakat umum. Salah satu contoh dampak dengan adanya kegiatan ini yaitu, masyarakat umum dapat teredukasi tentang pemenuhan hak anak dan menjelaskan bahwa seorang anak yang menjadi korban tidak perlu dijauhi melainkan harus tetap diberikan support. Masyarakat dianjurkan untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar, karena terwujudnya Kota Layak Anak merupakan hasil dari usaha pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan ini memang belum sempurna karena masih banyak ditemukan permasalahan terkait anak. Namun kegiatan ini harus tetap dilakukan dengan memberikan inovasi baru agar tingkat permasalahan pada anak di Surabaya menjadi tuntas.

2. Dampak Ekonomi

Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak ini tentunya diperlukan anggaran yang tidak sedikit, menurut beberapa stakeholder di tingkat kecamatan mereka mengeluhkan terkait hambatan/kendala dalam program ini salah satunya adalah belum tersedianya anggaran khusus untuk kepentingan anak, agar tujuan kecamatan layak anak tercapai. Disamping itu untuk permasalahan terkait kesulitan dalam hal ekonomi, beberapa kali juga diberikan bantuan berupa sembako,

uang, maupun bantuan permakanaan. Bantuan tersebut berasal dari Dinas Sosial maupun iuran swadaya pihak kecamatan.

3. Dampak Positif dan Dampak Negatif

Dampak positif: melalui kegiatan Layak Anak dapat membantu untuk mengakselerasi konvensi Hak Anak seperti contoh dalam indikator substansi yaitu pembentukan kelompok/Forum Anak, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak, prevelensi angka gizi buruk, gizi kurang, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, kawasan tanpa rokok, wajib belajar 12 tahun, serta sekolah Ramah Anak.

Dampak Negatif: hampir tidak ada dampak negatif dari kegiatan ini karena kegiatan ini sangat membantu Kota Surabaya untuk menuntaskan segala permasalahan terkait pemenuhan hak anak meskipun belum sepenuhnya tercapai dan maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari proses implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, hingga dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa Kota Layak Anak merupakan bentuk program tingkat kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan basis hak anak dengan pengintegrasian sumber daya dan komitmen pemerintah, swasta serta masyarakat, yang direncanakan dengan komprehensif dan berkelanjutan pada program, kebijakan dan aktivitas agar dapat memberikan jaminan tercukupinya hak anak.

Dalam implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya baik dari segi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat melalui berbagai pintu, misalnya media sosial, sosialisasi, pengaduan, dan kotak suara yang tersedia dan disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, maka diperlukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Kemudian, sumber dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Layak Anak berasal dari APBD. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan iuran antar pelaksana kegiatan apabila dibutuhkan. Lalu, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan

bisa tercapai dengan maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas. Dalam kegiatan ini terjalin sikap komitmen yang baik antar pelaksana kegiatan Layak Anak dan tidak berbelit.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Kegiatan Layak Anak yang berjalan telah sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan serta kerjasama yang terjalin antar pelaksana sudah baik, namun masih ditemukan beberapa kendala/hambatan yang wajar terjadi, seperti perbedaan pendapat. Tentunya dalam kegiatan ini para pelaksana memiliki komitmen dan loyalitas yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerja sama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan. Lalu, komunikasi yang terjalin sudah efektif dalam penyampaian informasi karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya. Serta masyarakat kota Surabaya merespon positif dengan adanya kegiatan Layak Anak ini.

Terkait Evaluasi kegiatan Layak Anak di kota Surabaya bisa dilihat dari kerjasama yang terjalin baik antara pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak, penyelesaian permasalahan cukup cepat, tepat, dan tidak berbelit, pencapaian hasil kegiatan sejauh ini cukup membantu pemerintah dalam menuntaskan kasus permasalahan anak, kegiatan Layak Anak cukup tersebar secara merata di seluruh Kota Surabaya. Dan tentunya masyarakat sangat

menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak serta mereka juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini.

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak agar supaya memperkuat sumber daya baik manusia dan finansial, dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan anggaran yang tersedia masih sangat terbatas yang tentunya menghambat proses kebijakan KLA sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan dan belum mampu untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan KLA.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) kepada stakeholders.
3. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pencetus kebijakan diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan mengevaluasi dan memantau kualitas kegiatan-kegiatan yang terkait dan efektivitas Tim Pelaksana Gugus Tugas Kota Layak Anak, serta melakukan komunikasi yang lebih intensif diantara gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) dan monitoring secara berkala, tidak lupa mengadakan sosialisasi yang lebih merata sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat bisa lebih ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin. 2014. *manajemen birokrasi dan kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 2004. *Pengantar kebijakan Publik (terjemahan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.

- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2005. PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Terjemahan Tri Wibowo B. S. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Riant Nugroho. 2009. Public Policy (edisi revisi). Jakarta: PT. Elex Media.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV

Undang-Undang

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak (KLA)

Artikel Online

Mubyarsah, Latu Ratri. 2022. *Kekerasan pada Anak di Surabaya Meningkat 24 Persen*. <https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2022/kekerasan-pada-anak-di-surabaya-meningkat-24-persen/?page=all> 28 Oktober 2022 (13.05).

Jurnal

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377-390.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.

Prasetya, A., & Rahman, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 224-235.

Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.

Widyawati, I., & Adi, A. S. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan

Kabupaten Layak Anak Di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5(2), 33-50.

Skripsi

Saputra, Wahyu. P. A. 2019. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Salatiga (Universitas Negeri Semarang).

TRANSKIP PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, KaSi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Genteng, KaSi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Wonocolo, dan KaSi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Benowo

1. Bagaimana implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?

A. Komunikasi:

1. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya/ pihak kecamatan dengan kegiatan/program Pemerintah tentang Layak Anak?
2. Apa yang menjadi sumber informasi mengenai kejelasan dan tujuan kegiatan tersebut?
3. Melalui media atau sosialisasi apa saja prosedur pelayanan program Pemerintah tentang Layak Anak disajikan?
4. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

B. Sumber Daya:

1. Berapa jumlah staff Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya/ pihak kecamatan dan beberapa kegiatan lainnya yang menjadi bagian dalam pelayanan program Pemerintah tentang Layak Anak?

2. Apakah jumlah tersebut telah mencukupi untuk melayani masyarakat dan tindak permasalahan terkait layak anak di Kota Surabaya?
3. Apakah ada standar atau kompetensi yang harus dimiliki tiap staff untuk bagian-bagian tersebut?
4. Apakah pelaksanaan kegiatan terkait Layak Anak melibatkan lebih dari 1 instansi/stakeholder dalam mencapai tujuan?
5. Apakah tersedia fasilitas fisik/prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan terkait Layak Anak?
6. Dalam menyediakan sarana prasarana, berasal dari manakah anggaran dana tersebut?

C. Disposisi:

1. Bagaimana komitmen dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) / pihak kecamatan dan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan terkait Layak Anak di Kota Surabaya?
2. Apakah ada evaluasi bagi para staff yang melayani masyarakat?

D. Struktur Birokrasi:

1. Bagaimana struktur birokrasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) / pihak kecamatan sebagai pelaksana kegiatan terkait Layak Anak Kota Surabaya?

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan (SOP) pelaksanaan untuk mendukung terlaksananya kegiatan terkait Layak Anak?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?

A. Faktor Pendukung

Logika:

1. Apakah yang menjadi faktor pendukung dari implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?

Hakikat Kerjasama:

1. apakah semua pelaksana program telah melakukan kerjasama yang baik?

Ketersediaan sumber daya manusia:

1. apakah pelaksana program memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut?

B. Faktor Penghambat

Isi Kebijakan:

1. Apakah seluruh kegiatan yang disampaikan dalam program Pemerintah tentang Layak Anak mudah dipahami oleh masyarakat?

Informasi:

1. Dalam penyampaian informasi antar-pelaksana, masih adakah kesalahpahaman atau missed-komunikasi?

Dukungan:

1. Bagaimana dukungan dari masyarakat? Apakah masih mengalami masalah?

Pembagian potensi:

1. Apakah pembagian tugas dalam melaksanakan implementasi sudah sesuai dengan potensi masing-masing pelaksana?

3. Bagaimana dampak evaluasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya?**A. Efektivitas:**

1. Apakah pelaksanaan program Pemerintah tentang Layak Anak telah efektif?
2. Apakah pelaksanaan program Pemerintah tentang Layak Anak pada tahun 2010 hingga 2022 telah sesuai dengan SOP?

B. Efisiensi:

1. Bagaimana efisiensi dari program Pemerintah tentang Layak Anak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
2. Bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)/ pihak kecamatan dalam pelaksanaan program Pemerintah tentang Layak Anak agar kedepannya lebih efisien?

C. Kecukupan:

1. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?

D. Perataan:

1. Apakah program Pemerintah tentang Layak Anak telah dilakukan secara merata di Kota Surabaya?



E. Responsivitas:

1. Apakah hasil program Pemerintah tentang Layak Anak mendapat respon yang baik dari masyarakat dan memberikan dampak yang baik juga pada masyarakat?

F. Ketepatan:

1. Apakah pelaksanaan program Pemerintah tentang Layak Anak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN

| | |
|---|--|
|  | <p>YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STATUS TERAKREDITASI</p> <p>Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601</p> |
| Nomor : 18 /I/2023/FSP/UBHARA | Surabaya, 5 Januari 2023 |
| Lampiran : - | |
| Perihal : <u>Permohonan ijin Penelitian & Survey</u> | |
| | Kepada Yth. Kepala Kecamatan Genteng Jl. BKR Pelajar 43 Surabaya di Surabaya |
| Dengan Hormat, | |
| 1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. | |
| 2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah: | |
| Nama | : Poppy Abellya Zalabilla |
| NIM | : 1913111051 |
| Fakultas | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Judul | : Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya |
| Tempat Penelitian | : - Kecamatan Genteng |
| Lama Penelitian | : 3 bulan |
| 3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih. | |
| |  Dekan Dra. Ni Prasetijowati, M.Si. |
| TEMBUSAN : Yth. - Kepala LPPM UBHARA | |

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022

Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 25 /I/2023/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 9 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota
Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3
di
Surabaya

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Poppy Abellya Zalabilla |
| NIM | : 1913111051 |
| Fakultas | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Judul | : Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya |
| Tempat Penelitian | : - Kantor Kecamatan Benowo, Jl. Kendung No 47, Sememi, Kec. Benowo |
| Lama Penelitian | : 3 bulan |
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (LL3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 10 Januari 2023

Nomor : 070 / 115 / S / RPM / 436.7.15 / 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada
Yth. (terlampir)
di
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 070/0490436.8.6/2023 Tanggal 09 Januari 2023

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 25/0203/F/SPUBHARA Tanggal 9 Januari 2023 Penihal Permohonan Ijin Penelitian & Survey.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : POPPY ABILLYA ZALZABILLA
b. Alamat : PAKIS GUNUNG 1-B/7
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : KEBJAKSAAN PUBLIK/MASYARAKAT
d. Penanggung Jawab : ISMAIL, S.SOS., M.Si.
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 11 Januari 2023 s.d. 11 Maret 2023
g. Lokasi : (terlampir)

Dengan persyaratan :

1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assesment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketuhanan NRG;
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

a.n WALKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


DEWI SOKRIYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001



Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran
Nomor : 070 / 115 / S / RPM / 436.7.15 / 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

Kepada :

1. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kota Surabaya
2. Camat Wonokromo Kota Surabaya
3. Camat Genteng Kota Surabaya
4. Camat Benowo Kota Surabaya

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
 Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : POPPY ABELLYA ZALZABILLA NIM : 1913111051
 Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA
 Pembimbing 1 : Ismail, S.Sos., M.Si. NIDN : 0884750101
 Pembimbing 2 : Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP. NIDN : 0723059004

| NO | TANGGAL | CATATAN REVISI | ACC |
|----|--------------------|--|-----|
| 1 | 6/12 ²² | Catatan revisi pengajuan judul : <i>--tidak ada--</i> revisi bab I dan bab II | |
| 2 | 9/1 ²³ | revisi judul, bab I dan bab II | |
| 3 | 30/1 ²³ | bab III dan menyiapkan pedoman wawancara | |
| 4 | 15/3 ²³ | penyajian data bab IV | |
| 5 | 29/4 ²³ | revisi bab IV | |
| 6 | 15/5 ²³ | bab IV dan bab V | |
| 7 | 29/5 ²³ | Aec | |

Surabaya, 22 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :
 29 Mei 2023
 untuk mengikuti ujian: Proposal / Skripsi*)
 Dosen pembimbing 1,

Ismail, S.Sos., M.Si.

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
 Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

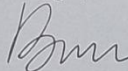
FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : POPPY ABELLYA ZALZABILLA NIM : 1913111051
 Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA
 Pembimbing 1 : Ismail, S.Sos., M.Si. NIDN : 0884750101
 Pembimbing 2 : Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP. NIDN : 0723059004

| NO | TANGGAL | CATATAN REVISI | ACC |
|----|-----------|---|-----|
| 1 | 13-3-2023 | Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada-- Judul direnungkan pakai Implementasi atau evaluasi menggunakan dan mencantumkan teori evaluasi kebijakan publik dibah 4 | Bu |
| 2 | 29-5-2023 | pendalaman isi ditrap poin-poin Part Bab 4 pembahasan Redaksional Spasi perbab dan perparagraf | Bu |
| 3 | 31-5-2023 | ACC | Bu |

Surabaya, 22 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :
 31. Mei. 2023
 untuk mengikuti ujian: **Proposal / Skripsi***
 Dosen pembimbing 2,


 Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Dokumentasi bersama Bapak Dicky Prastya Kuswardhana, S.Psi selaku staff
bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak**

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Dokumentasi bersama . Ibu Rochmi Nugrahani selaku KaSi Kesejahteraan
Rakyat dan Perekonomian (KESPER) kecamatan Genteng**

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Bapak Muclish Hariadi, S.Sos selaku Camat Wonocolo dan Ibu Budi Yusvandayani selaku KaSi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KESPER) kecamatan Wonocolo

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Bapak Fendy Ardiani Pradhana S.STP selaku KaSi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (KESPER) kecamatan Benowo